

**DAMPAK *OVERCROWDING TOURISM* TERHADAP PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT*)
DI REPUBLIK CEKO**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

DINDA SALSABILA

E061181027

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK *OVERCROWDING TOURISM* TERHADAP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE
DEVELOPMENT*) DI REPUBLIK CEKO

N A M A : DINDA SALSABILA

N I M : E061181027

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 4 Agustus 2022

Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003


Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIK. 198909132020053001

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,


H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK *OVERCROWDING TOURISM* TERHADAP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE
DEVELOPMENT*) DI REPUBLIK CEKO

N A M A : DINDA SALSABILA

N I M : E061181027

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 1 Agustus 2022.

Ketua : Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Burhanuddin, S.IP, M.Si

2. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

TIM EVALUASI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Salsabila
NIM : E061181027
Program Studi : Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Referensi untuk semua kutipan langsung maupun tidak langsung sudah dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 23 Agustus 2022



(Dinda Salsabila)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Salsabila
NIM : E061181027
Program Studi : Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**DAMPAK *OVERCROWDING TOURISM* TERHADAP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE
DEVELOPMENT*) DI REPUBLIK CEKO**

bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Makassar
Pada tanggal : 24 Agustus 2022

Yang menyatakan,



(Dinda Salsabila)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala berkah, rahmat, hidayah, kekuatan, ilmu, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul yakni “Dampak *Overcrowding Tourism* terhadap Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) di Republik Ceko” dengan baik dan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi ini merupakan bentuk kontribusi penulis sesuai dengan bidang keilmuan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah *overcrowding tourism* dan pembangunan berkelanjutan. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., keluarganya dan para sahabatnya karena berkat perjuangannya kita dapat menikmati indah dan manisnya islam hingga hari, menit, dan detik ini.

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala-kendala yang dialami oleh penulis selama proses penyusunan, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Dengan demikian, penulis mengharapkan umpan balik berupa kritik dan saran dari pembaca sebagai bahan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini agar kedepannya penulis dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik serta memberi lebih banyak manfaat bagi para pembaca. Selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi, penulis juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Orang tua yang sangat penulis cintai dan kasihi, yaitu Papa Drs. Ahmadi DM dan Mama A. Risma Neswati, SE. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan dan didikan yang telah diberikan sejak penulis lahir hingga dapat tumbuh menjadi dewasa sebaik dan sebahagia ini. Semua langkah yang penulis ambil selalu disertai oleh doa, dukungan dan pengorbanan dari orang

tua penulis. Semoga penulis dapat membalas segala pengorbanan, kasih sayang dan kebaikan mereka hingga akhir hayat.

2. Keluarga inti Maccini 64. Kepada kedua saudara penulis, Kak Liza dan Ruly. Terima kasih karena senantiasa memberi dukungan dan tak jarang memberi 'asupan' gratis agar penulis semangat dalam menyusun skripsi ini. Doakan penulis segera mendapatkan pekerjaan agar dapat membalas budi kebaikan kalian berdua. Teruntuk nenek ku tersayang, Hj. Asma. Terima kasih karena menjadi salah satu motivasi terbesar penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan menata kehidupan yang lebih baik agar penulis dapat membahagiakan nenek seperti cara nenek dalam memberi kebahagiaan dan kasih sayang yang penulis dapatkan sejak kecil hingga dewasa ini. Terkhusus alm. Tante Anti, terima kasih banyak atas segala jasa, bantuan, kebaikan, dan cinta yang luar biasa yang penulis dapatkan semasa tante masih ada. Doakan penulis dapat melanjutkan cita-cita dan impian tante kedepannya.
3. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta jajarannya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt., Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
4. Kepala Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Phil Sukri, Ph.D., beserta jajarannya Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si., dan Wakil Dekan Bidang Alumni dan Kemitraan Bapak Dr. Hasrullah, M.Si.
5. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak H. Darwis, MA., Ph.D

6. Ibu Seniwati, S.Sos., M.Hum., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., MIR selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingan substansi dan materil, masukan, serta motivasi yang diberikan sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
7. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional terkhusus Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA., Bapak (alm) Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si., Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si., Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., MA., dan Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA. Terima kasih atas ilmu, bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga baik di akademik maupun non-akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin.
8. Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bu Rahma, Kak Dayat, Kak Ita, dan Pak Ridho.

Terima kasih atas semua bantuannya. Penulis mengucapkan permohonan maaf apabila masih terdapat ketidaksempurnaan dalam skripsi ini. Semoga penulis dapat memberikan kontribusi lainnya dan menghasilkan penelitian yang lebih baik. Akhir kata, penulis kembali menghaturkan terima kasih bagi setiap pihak yang berkontribusi maupun kepada pembaca.

Makassar, 23 Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu *overcrowding tourism* dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Republik Ceko yang dinilai sebagai ancaman terhadap SDGs di Republik Ceko. Kondisi tersebut memengaruhi realisasi dari upaya pemerintah Republik Ceko untuk mengimplementasikan secara maksimal tujuan SDGs nomor 8 mengenai pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, tujuan nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, serta tujuan nomor 17 mengenai kemitraan di Republik Ceko. Selain membahas mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena *overcrowding tourism*, penelitian ini turut mengemukakan strategi pemerintah Ceko sebagai respon terhadap dampak yang ditimbulkan dari fenomena *overcrowding tourism*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak *overcrowding tourism* terhadap pembangunan berkelanjutan di Republik Ceko dan juga untuk menganalisis strategi pemerintah terhadap dampak *overcrowding tourism* di Republik Ceko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan dampak *overcrowding tourism* terhadap pembangunan berkelanjutan di Republik Ceko dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Adapun strategi yang diterapkan oleh pemerintah Republik Ceko sebagai respon terhadap dampak *overcrowding tourism* yakni melalui kebijakan perumahan di Republik Ceko, pendekatan terhadap penduduk lokal dan upaya untuk merawat ruang publik, kebijakan kewirausahaan, hingga penetapan standarisasi Destination Management Organisation dan Quality Measurement System terhadap objek wisata di Ceko. Strategi tersebut sejalan dengan teori pembangunan pariwisata berkelanjutan yang juga berkaitan dengan fenomena *overcrowding tourism*.

Kata Kunci : *Overcrowding Tourism*, Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), Republik Ceko.

ABSTRACT

This research is motivated by the issue of overcrowding tourism and its impact on sustainable development in the Czech Republic that is considered as a threat to the implementation of SDGs in the Czech Republic. These conditions affect the realization of the Czech Republic government's efforts to maximally implement SDGs goal number 8 regarding economic growth and decent work, goal number 12 regarding responsible consumption and production, and goal number 17 regarding partnership for the goals in the Czech Republic. In addition to discussing the negative impacts of the overcrowding tourism phenomenon, this study also discuss the Czech government's strategy as a response to the impacts of the overcrowding tourism phenomenon. The purpose of this study is to identify the impact of overcrowding tourism on sustainable development in the Czech Republic and also to analyze the government's strategy on the impact of overcrowding tourism in the Czech Republic. This study uses a qualitative method to describe the impact of overcrowding tourism on sustainable development in the Czech Republic by using secondary data obtained through literature studies to then be analyzed and drawn conclusions. The strategy implemented by the Czech Republic government as a response to the impact of overcrowding tourism is through the Czech Republic housing policy, approaches to local residents and efforts to maintain public spaces, entrepreneurial policies, the establishment of standardization of Destination Management Organizations and Quality Measurement Systems for tourism objects in the Czech Republic. This strategy is in line with the theory of sustainable tourism development that is also related to the phenomenon of overcrowding tourism.

Keyword : *Overcrowding Tourism, Sustainable Development, Czech Republic.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1.4 Kerangka Konseptual.....	16
1.4.1 <i>Overcrowding Tourism</i>	17
1.4.2 Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).. ..	20
1.4.3 Operasionalisasi Variabel	28
1.4.4 Model Analisis	30
1.4.5 Asumsi dan Hipotesis	30
1.5 Metode Penelitian	31
1.5.1 Tipe Penelitian.....	31
1.5.2 Jenis Data	32
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.. ..	32
1.5.4 Teknik Analisis Data	33
1.6 Sistematika Penulisan	34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..	35
2.1 <i>Overcrowding Tourism</i>	35
2.2 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan..	46
2.3 Penelitian Terdahulu	64
BAB III GAMBARAN UMUM	70
3.1 Profil Negara Republik Ceko..	70
3.2 Dinamika Industri Pariwisata di Republik Ceko	80
3.2.1 Jenis-Jenis Pariwisata di Republik Ceko.....	80
3.2.1.1 Pariwisata Hiburan (<i>Entertainment Tourism</i>).....	81
3.2.1.2 Pariwisata Alam (<i>Nature Tourism</i>).....	84
3.2.1.3 Pariwisata Sejarah (<i>Cultural Tourism</i>).....	88
3.2.2 Republik Ceko sebagai Objek Wisata Internasional	92
BAB IV DAMPAK <i>OVERCROWDING TOURISM</i> TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (<i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT</i>) DI REPUBLIK CEKO.....	96
4.1 Dampak <i>Overcrowding Tourism</i> terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Republik Ceko.....	99
4.1.1 Dampak terhadap Kenaikan Harga Barang dan Jasa	99
4.1.2 Dampak terhadap Kepadatan Wilayah.....	105
4.1.3 Dampak terhadap Aktivitas Ekonomi Pengunjung	110
4.1.4 Dampak terhadap Kenyamanan Objek Wisata	117
4.2 Strategi Pemerintah terhadap Dampak <i>Overcrowding Tourism</i> di Republik Ceko	125
4.2.1 Strategi terhadap Dampak Kenaikan Harga Barang dan Jasa.....	125
4.2.2 Strategi terhadap Dampak Kepadatan Wilayah	128
4.2.3 Strategi terhadap Dampak Aktivitas Ekonomi Pengunjung.....	132
4.2.4 Strategi terhadap Dampak Kenyamanan Objek Wisata	132

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	139
5.1 Kesimpulan	139
5.2 Saran	141
DAFTAR PUSTAKA.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kota Paling Banyak Dikunjungi Di Eropa (Pengunjung Internasional)	3
Tabel 1. 2 Operasionalisasi Variabel	29
Tabel 2. 1 Indikator SDGs nomor 8.....	53
Tabel 2. 2 Indikator SDGs nomor 12.....	57
Tabel 2. 3 Target SDGs nomor 17.....	60
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu.....	64
Tabel 3. 1 PDB Republik Ceko Tahun 2000-2019.....	75
Tabel 3. 2 Jumlah Pengunjung Pariwisata Kebun Binatang di Republik Ceko	83
Tabel 4. 1 Jumlah Populasi Republik Ceko dan Kota Praha & Jumlah Keseluruhan Wisatawan Asing di Republik Ceko dan Kota Praha Tahun 2012 - 2019.....	102
Tabel 4. 2 Perbandingan Data Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi di Republik Ceko (Variasi Tahunan dalam %) Tahun 2012-2019	102
Tabel 4. 3 Perbandingan Jumlah Wisatawan di Kota-Kota Bersejarah di Ceko Tahun 2018.....	105
Tabel 4. 4 Nilai Tambah Bruto berdasarkan Wilayah Tahun 2019	108
Tabel 4. 5 Strategi I (Memperhatikan Kepentingan Penduduk Lokal).....	130
Tabel 4. 6 Strategi II (Merawat Ruang Publik)	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kota Yang Paling Banyak Dikunjungi Di Eropa Pada Tahun 2017.....	2
Gambar 3.1 Republik Ceko sebagai Negara yang Tekurung oleh Daratan (<i>landlocked country</i>).....	72
Gambar 3.2 Republik Ceko dan Pembagian Wilayahnya.....	73
Gambar 3.3 Pariwisata Hiburan di Republik Ceko.....	82
Gambar 3.4 Rekreasi Destinasi Wisata Berbasis Alam.....	84
Gambar 3.5 Jumlah Pengunjung Objek Budaya Republik Ceko Tahun 2016.....	89
Gambar 4.1 Jumlah Pengunjung di Bandara Václav Havel Praha, Republik Ceko tahun 2006 hingga 2020 (dalam jutaan).....	112

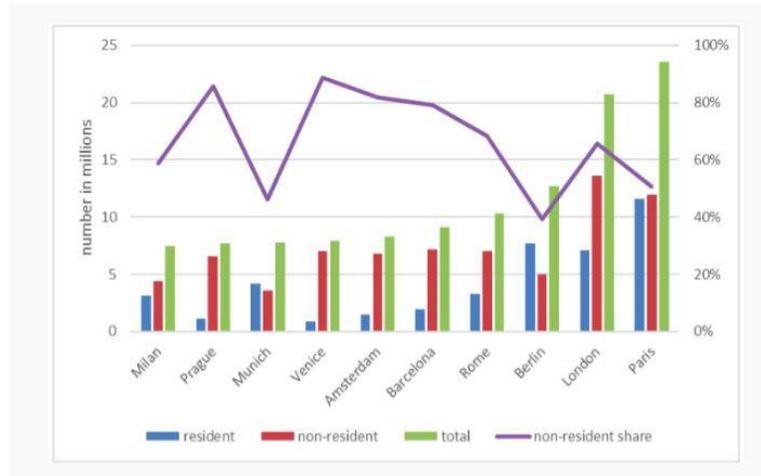
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepadatan wilayah yang disebabkan oleh turis atau yang dalam istilah pariwisata disebut sebagai *overcrowding tourism* bukanlah masalah yang baru. *Overtourism* merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai negara dengan destinasi wisata unik dan menarik. Industri pariwisata global selama satu dekade terakhir turut mengalami pertumbuhan yang pesat dan selama periode pertumbuhan berkelanjutan ini, Eropa menegaskan posisinya sebagai salah satu kawasan wisata dunia. Menurut UNWTO, kawasan Eropa mengalami 710 juta kedatangan internasional (*international arrivals*) pada tahun 2019 (Interreg Europe, 2020). Hal ini menunjukkan adanya kepadatan wilayah yang disebabkan oleh turis di kawasan Eropa.

Kepadatan wilayah ini kemudian diidentifikasi sebagai fenomena *overcrowding tourism* yang menjadi suatu isu global yang serius apabila tidak ditanggapi dengan baik oleh negara-negara yang memiliki angka wisatawan asing yang tinggi. Pada kawasan Eropa, ada beberapa negara yang mengalami *overcrowding tourism* karena jumlah wisatawan asing yang bertambah di setiap tahunnya. Berikut adalah gambar dan tabel yang menunjukkan peningkatan jumlah turis internasional yang mengunjungi berbagai kota populer di kawasan Eropa, yakni:



Gambar 1. 1 Kota Yang Paling Banyak Dikunjungi Di Eropa Pada Tahun 2017
 Sumber: Vanicek, 2020.

Berdasarkan gambar yang tertera di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 ada sepuluh kota di Eropa dengan angka wisatawan asing yang tinggi. Kota pertama yaitu Paris dengan persentase 90% wisatawan yang memilih untuk berkunjung di kota Paris (Prancis), kemudian pada urutan kedua yaitu kota London (Inggris) dengan persentase 80% dari total wisatawan yang berkunjung di Eropa memilih untuk berwisata di London. Lalu kota Berlin (Jerman) menempati urutan ketiga dengan jumlah wisatawan sebesar 70% dari total wisatawan di Eropa, kemudian Roma (Italia) di urutan keempat dengan angka persentase sebesar 40% dari total wisatawan Eropa dan Barcelona (Spanyol) menempati urutan kelima dengan persentase 30% wisatawan Eropa yang memilih Barcelona sebagai destinasi wisata.

Sementara itu, Amsterdam di urutan keenam, Venesia (Italia) di urutan ketujuh, Munich (Jerman) di urutan kedelapan, Praha (Republik Ceko) pada urutan kesembilan, dan Milan (Italia) menempati urutan kesepuluh. Kelima kota ini memiliki angka wisatawan yang hampir sama, yaitu berada pada ratio 20-30% dari

total wisatawan yang memilih kawasan Eropa untuk berwisata. Praha yang berada di urutan kesembilan, merupakan bagian wilayah yang akan menjadi fokus penulis untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomena *overcrowding tourism* yang terjadi di Republik Ceko.

Tabel 1. 1 Kota Paling Banyak Dikunjungi Di Eropa (Pengunjung Internasional)
Sumber: AirMundo, 2020.

No.	Kota	2019	Dibandingkan dengan 2018
1	London, Inggris	19,559,900	+1,7%
2	Paris, Prancis	19,087,900	+8,7%
3	Istanbul, Turki	14,715,900	+9,6%
4	Antalya, Turki	13,332,100	+7,2%
5	Roma, Italia	10,317,000	+2,5%
6	Praha, Republik Ceko	9,150,900	+2,3%
7	Amsterdam, Belanda	8,835,400	+5,8%
8	Barcelona, Spanyol	7,016,600	+4,5%
9	Vienna, Austria	6,634,700	+3,5%
10	Milan, Italia	6,604,400	+1,9%

Berbeda dengan penjelasan mengenai gambar yang telah tertera sebelumnya, tabel di atas menunjukkan adanya kenaikan angka wisatawan asing di kota-kota yang terletak di kawasan Eropa pada tahun 2019. London berada pada urutan pertama

dengan jumlah pengunjung asing sebanyak $\pm 19,5$ jt. London mengalami peningkatan pengunjung sebesar 1,7% jika dibandingkan dengan angka wisatawan yang berkunjung di London pada tahun 2018. Urutan kedua yaitu Paris dengan total wisatawan asing sebanyak ± 19 jt dan mengalami kenaikan jumlah pengunjung sebanyak 8,7% dibandingkan dengan tahun 2018. Lalu pada posisi ketiga ditempati oleh Istanbul dengan jumlah wisatawan asing sebesar $\pm 14,7$ jt dan pada 2019 mengalami kenaikan jumlah pengunjung sebesar 9.6%. Kemudian Antalya berada pada urutan kelima dengan jumlah wisatawan asing sebesar $\pm 13,3$ jt dan menunjukkan adanya kenaikan angka wisatawan asing sebesar 7,2% dari tahun 2018. Posisi kelima diduduki oleh Roma dengan $\pm 10,3$ jt pengunjung pada tahun 2019 yang ditandai dengan kenaikan angka pengunjung asing sebesar 2,5% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu Praha berada di urutan keenam dengan angka wisatawan asing berjumlah $\pm 9,1$ jt di tahun 2019. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah pengunjung internasional di kota Praha sebesar 2,3% dibandingkan dengan tahun 2018. Praha merupakan salah satu kota di Republik Ceko yang kemudian menjadi fokus penelitian penulis dalam melihat fenomena *overcrowding tourism* yang terjadi di Ceko. Berikutnya, Amsterdam yang menempati posisi ketujuh sebagai kota yang paling banyak dikunjungi oleh pengunjung internasional dengan jumlah $\pm 8,8$ jt wisatawan asing dan mengalami kenaikan angka pengunjung dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 5,8% lalu Barcelona berada pada urutan kedelapan dengan

jumlah wisatawan asing sebesar ±7 jt pengunjung dan turut mengalami kenaikan 4,5% dibandingkan dengan 2018. Selain itu, Vienna dengan angka wisatawan asing sebesar ±6,6 jt dengan persentase kenaikan jumlah pengunjung sebesar 3,5% dibandingkan tahun 2018 dan menjadikan Milan sebagai kota kesepuluh di kawasan Eropa yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan asing dengan total angka pengunjung sebesar ±6,6 jt dan data menunjukkan bahwa Milan mengalami kenaikan jumlah pengunjung dibandingkan dengan 2018 sebesar 1,9% dari total wisatawan asing.

Berdasarkan tabel yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa minat masyarakat internasional untuk melakukan perjalanan wisata ke kota maupun negara di kawasan Eropa selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Bahkan peningkatan angka wisatawan tersebut mampu menyentuh ratio yang cukup besar. Angka tersebut turut memudahkan kita untuk mengidentifikasi negara atau kota mana yang sedang mengalami fenomena *overcrowding tourism*.

Walaupun banyak turis yang berusaha untuk “hidup seperti penduduk lokal” guna mendapatkan pengalaman pariwisata yang otentik dan berkesan selama periode kunjungan mereka, di sisi lain para penduduk lokal justru merasakan keunikan dari wilayah domisili mereka perlahan memudar dan semata-mata hanya bergantung pada keramaian pengunjung, produk souvenir, dan tempat wisata (Milano, Cheer, & Novelli, 2018a). Para penduduk lokal perlahan merasakan penderitaan akibat fasilitas dan infrastruktur lokal yang seharusnya bisa mereka manfaatkan secara maksimal,

justru membuat mereka berada di bawah tekanan yang besar karena arus pariwisata yang masif yang menyebabkan penduduk lokal harus hidup berdampingan dengan gelombang turisme yang setiap hari semakin bertambah. *Overcrowding tourism* tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi penduduk lokal yang harus beradaptasi dengan segala konsekuensi dari kepadatan penduduk yang terjadi di tempat tinggalnya. Bahkan di negara-negara dengan tingkat wisatawan asing yang tinggi, para penduduk lokal harus hidup berdampingan dengan keramaian yang ditimbulkan dari aktivitas para wisatawan asing sehari-hari, khususnya di tempat wisata yang umumnya dikunjungi oleh wisatawan.

Menurut Framba, peristiwa *overcrowding tourism* banyak terjadi di negara-negara seperti di Palma de Mallorca (Spanyol), Paris (Prancis), Dubrovnik (Kroasia), Kyoto (Japan), Berlin (Jerman), Bali (Indonesia), dan Reykjavik (Islandia). Bahkan di tahun 2018, Thailand terpaksa menutup akses pariwisatanya akibat jumlah wisatawan yang mengunjungi The Maya Beach telah menyebabkan kerusakan lingkungan di daerah tersebut (Framba, 2020). Selain kota-kota yang tertera di atas, *overcrowding tourism* juga terjadi di Barcelona karena dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berhasil untuk menarik perhatian masyarakat internasional dikarenakan pertumbuhan angka pariwisata yang pesat, khususnya pada periode liburan. Pada tahun 2017, destinasi yang ada di Barcelona dapat dikunjungi oleh kurang lebih 30 juta pengunjung. Angka yang besar apabila dibandingkan dengan populasi penduduk asli yang hanya menyentuh di angka 1,6 juta orang (Milano, Cheer, & Novelli,

2018b). Hal ini menunjukkan bahwa Barcelona merupakan salah satu kota tujuan wisata yang setiap tahunnya menampung lebih banyak wisatawan asing daripada penduduk lokal.

Pada dasarnya, fenomena *overtourism* membawa masalah yang serius kepada pemerintahan di suatu negara, maupun ke tingkatan masyarakat. Klaim tersebut didasarkan oleh fakta yang menunjukkan bahwa apabila *overtourism* terjadi di suatu daerah, maka perekonomian yang ada di daerah tersebut dapat terganggu pula. Misalnya, penduduk lokal yang turut menanggung biaya pertumbuhan pariwisata yang terjadi di daerahnya. Ketika kota-kota mulai berubah menjadi tujuan wisatawan, maka rantai pasokan perjalanan global (*global travel supply chain*) akan meningkat. Hal tersebut bertepatan dengan meningkatnya properti dan biaya hidup bagi masyarakat lokal yang dapat menjadi masalah bagi pemerintah di kemudian hari.

Contohnya yang terjadi di Belanda. Pemerintah Kota Amsterdam sampai mengambil tindakan secara langsung dengan melakukan pelarangan penyewaan jangka pendek pada properti di Amsterdam dan mengarahkan penumpang wisata kapal pesiar untuk menjauh dari pusat kota guna mengurangi angka kepadatan penduduk di wilayahnya (Milano et al., 2018a). Negara kemudian akan menjadi aktor utama yang bertindak langsung dalam merespon dampak dari fenomena *overcrowding tourism*. Adapun respon yang seringkali dilakukan oleh negara ialah berupa pemberian kebijakan yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang dihadapi.

Kepadatan wilayah serta perilaku turis yang seringkali terkesan gaduh dan tidak terkendali turut menyebabkan masalah pada tingkatan masyarakat. Tentu saja pariwisata dapat membawa keuntungan berupa pekerjaan, peluang investasi, maupun manfaat ekonomi terhadap destinasi. Namun, ketika ekspansi pariwisata gagal untuk menyesuaikan dengan batasan dari daerah tersebut maka *overcrowding tourism* akan terjadi. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat kemudian menjadi aktor yang akan secara langsung menghadapi pengaruh luar biasa dari rantai pasokan pariwisata global. Hal ini yang kemudian menyebabkan keberlangsungan hidup maupun pembangunan berkelanjutan di suatu negara dapat terancam.

Oleh karena itu, dampak dari *overcrowding tourism* umumnya memengaruhi sektor ekonomi berupa keterbatasan lapangan pekerjaan yang layak maupun pertumbuhan ekonomi yang terhambat, adanya daya saing pada produk lokal dan hambatan pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta kelestarian sumber daya alam (darat dan laut). Jika melihat permasalahan ini, maka jelas dampak tersebut akan turut menjadi faktor penghambat bagi negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di negaranya.

Sehubungan dengan pembangunan berkelanjutan, maka dalam beberapa tahun terakhir kita telah diperkenalkan oleh suatu konsep yaitu konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan bentuk aksi global yang resmi disepakati oleh negara-negara dari berbagai benua guna mencapai pembangunan berkelanjutan yang ideal bagi setiap negara. SDGs memiliki 17 tujuan serta 169

Target Program yang diekspektasikan dapat tercapai pada tahun 2030 (United Nations: Department of Economic and Social Affairs, 2015a). Walaupun sebagian besar negara di dunia telah menyepakati upaya realisasi SDGs dan turut menjadikan SDGs sebagai cita-cita nasionalnya, namun fenomena *overcrowding tourism* tetap dinilai sebagai faktor penghambat yang mengancam negara-negara dengan jumlah wisatawan yang tinggi dalam merealisasikan tujuan SDGs-nya.

Dalam konteks ini, realisasi tujuan SDGs yang dinilai akan terhambat ialah tujuan nomor 8 mengenai “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*),” tujuan nomor 12 mengenai “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*),” dan tujuan nomor 17 mengenai “Kemitraan Demi Menggapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)” (United Nations: Department of Economic and Social Affairs, 2015a). Ketiga tujuan tersebut memiliki relevansi yang erat dengan fenomena *overcrowding tourism*.

Di sisi lain, dalam upaya mewujudkan ketiga tujuan SDGs yang telah disebutkan di atas, ketiga tujuan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan sektor pariwisata. Sebab, sektor pariwisata yang padat akan pengunjung dapat menjadi ancaman dalam menyukseskan tujuan SDGs yang ingin dimaksimalkan oleh suatu negara. Jika membahas mengenai destinasi wisata dan turisme, maka tidak banyak negara di kawasan Eropa yang memiliki pangsa pasar yang besar untuk sektor pariwisata seperti yang terjadi di Republik Ceko. Hal tersebut dapat

dibuktikan dengan merujuk kepada data yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 hingga 2019, angka turisme di Republik Ceko terus mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya (Vaníček, 2019). Pertumbuhan angka turis asing secara signifikan menjadikan Ceko sebagai salah satu negara yang paling diminati oleh pengunjung internasional dan turut menjadikan ibu kota Ceko, yaitu Praha sebagai kota yang padat akan turis asing.

Republik Ceko menjadi salah satu negara tujuan wisata utama di Eropa dengan adanya data yang menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 20 jt pengunjung yang berkunjung ke Ceko di setiap tahunnya. Alasan utama mengapa Ceko menjadi tujuan utama para wisatawan, sebab di Ceko terdapat 14 situs sejarah dan budaya yang telah diakui oleh UNESCO World Heritage Sites (Discover Czechia, 2019). 14 titik tersebut menjadi tujuan utama para turis untuk berkunjung ke Ceko. Wisata yang berbasis kepada situs sejarah dan budaya umumnya sukses menarik perhatian para wisatawan. Melalui survei yang dilakukan oleh CzechTourism, terdapat sebanyak 36% wisatawan lokal dan 41% wisatawan internasional yang menjadikan destinasi wisata berbasis situs sejarah dan budaya sebagai alasan utama mereka untuk berkunjung ke Ceko (Vaníček, 2019). Dengan kemegahan situs bersejarah yang dimiliki oleh Ceko, maka tak heran apabila Ceko mampu menarik perhatian wisatawan asing.

Tingginya jumlah pengunjung yang berwisata di Ceko tak lepas dari pesona Ceko sebagai negara yang kaya akan peninggalan sejarah dan budaya. Tujuan wisata

di Ceko yang umumnya ramai dikunjungi oleh turis ialah wisata petualang (*adventure tourism*), wisata alam (*nature tourism*), serta wisata sejarah dan budaya (*cultural heritage tourism*). Ketiga tujuan wisata tersebut merupakan tujuan wisata yang paling diminati (Novotna, Frantal, Kunc, & Kubickova, 2019). Namun, daya tarik wisatawan yang dimiliki oleh Ceko tak selamanya dapat membawa dampak positif kepada negara. Beberapa daerah di Ceko dikunjungi oleh wisatawan dalam jumlah yang berlebihan sehingga telah mencapai batas kelestarian daerah tersebut. Misalnya yang terjadi di Kota Praha. Konsentrasi wisatawan yang tinggi di satu daerah menyebabkan beberapa masalah, seperti kondisi yang buruk bagi penduduk Kota Praha dengan adanya kenaikan harga pada barang/jasa.

Di sisi lain, Republik Ceko merupakan salah satu negara yang menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai fokus utamanya demi mewujudkan kesejahteraan umum warga negaranya. SDGs dalam hal ini dianggap penting karena SDGs dapat berperan sebagai salah satu indikator utama sekaligus tolak ukur untuk menilai seberapa baik suatu negara dalam mengelola negaranya dan mewujudkan kondisi negara yang ideal. SDGs juga berguna untuk memastikan apabila suatu negara dapat melanjutkan tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun.

Maka dari itu penulis menilai ada keterkaitan yang jelas antara realisasi dari tujuan SDGs dengan fenomena *overcrowding tourism* yang terjadi di Republik Ceko. Penulis memahami bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk

mendorong kemajuan suatu negara, khususnya pada sektor sosial dan ekonomi tanpa memberi dampak negatif pada sektor lainnya. Sementara di sisi lain, fenomena *overcrowding tourism* justru membawa banyak lebih banyak dampak negatif sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Salah satu dampak negatif dari *overcrowding tourism* yang paling nyata ialah hambatan pada pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan dan cagar alam. Tak hanya itu, fenomena *overcrowding tourism* juga dapat menimbulkan konflik antar turis dan warga setempat yang terkadang mengganggu keberlangsungan hidup warga. Penduduk lokal mengklaim tidak dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya secara maksimal akibat adanya kegaduhan yang terjadi di daerah mereka. Seperti yang telah diketahui bersama, Praha dikenal sebagai kota tujuan berpesta dimana harga bir bahkan lebih murah dibandingkan harga air bersih (Ponikelska & Bloomberg, 2019). Maka tak heran apabila wisatawan asing memilih Praha sebagai kota untuk bersenang-senang tanpa menghiraukan penduduk lokal.

Akibat banyaknya tempat hiburan malam yang terdapat di sepanjang Kota Praha, penduduk lokal tak jarang mengadakan masalah tersebut ke pihak berwajib. Jan Stern yang baru saja ditunjuk sebagai “*Night Mayor*” yaitu sebuah badan di pemerintahan Republik Ceko yang bertugas untuk menjaga ketentraman kehidupan malam di Ceko mengatakan bahwa ia beserta timnya sedang bekerja untuk mengubah citra Ceko selama empat tahun kedepan. Stern menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah mengarahkan kota Praha selama empat tahun kedepan ke

citra yang lebih positif dengan cara memprofilkan kota Praha sebagai destinasi wisata budaya yang dapat membanggakan, tidak hanya melalui bangunan warisan UNESCO, akan tetapi Stern akan mengalihkan fokus penduduk lokal dan wisatawan asing kepada hiburan malam lainnya seperti teater, opera, maupun berbagai pameran seni. Hal ini dianggap penting untuk dilakukan guna menekan keluhan penduduk lokal akibat perilaku turis yang mengganggu kesejahteraan masyarakat Ceko (Ponikelska & Bloomberg, 2019). Kondisi yang tidak stabil ini tentu saja turut berkontribusi dalam terhambatnya pembangunan berkelanjutan secara maksimal.

Dikarenakan oleh alasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang dampak *overcrowding tourism* di Republik Ceko yang memengaruhi keberlangsungan pembangunan berkelanjutan yang ada di Ceko. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat judul penelitian, Dampak *Overcrowding Tourism* terhadap Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) di Republik Ceko.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada dampak *overcrowding tourism* terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Republik Ceko dalam rentang tahun 2015-2019. Alasan penulis dalam memilih rentang tahun tersebut dikarenakan SDGs baru diresmikan secara global pada tahun 2015. Penulis membatasi penelitiannya hingga pada tahun 2019, sebab berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis, aktivitas turisme di Ceko mengalami peningkatan yang signifikan hanya dalam kurun waktu 2015-2019,

tepatnya sebelum pandemi COVID-19 terjadi dan memengaruhi aktivitas pariwisata para wisatawan asing. Sedangkan pembangunan berkelanjutan yang akan dibahas oleh penulis ialah teori pembangunan pariwisata berkelanjutan yang merupakan bagian dari SDGs. Di antara 17 tujuan yang terdapat pada SDGs penulis memilih 3 dari 17 tujuan SDGs yang dijadikan fokus penelitian penulis.

Ketiga tujuan tersebut membahas mengenai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*), Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*), dan Kemitraan demi menggapai tujuan (*Partnership for the Goals*). Ketiga tujuan ini dipilih karena dapat memengaruhi optimalisasi pembangunan berkelanjutan yang memiliki relevansi dengan judul penelitian penulis. Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut, yakni:

1. Bagaimana dampak *overcrowding tourism* terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Republik Ceko?
2. Bagaimana strategi pemerintah terhadap dampak *overcrowding tourism* di Republik Ceko?

Penulis akan menggunakan dua pendekatan dalam mengidentifikasi dampak *overcrowding tourism* dan menganalisis dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan di Republik Ceko. Pendekatan pertama akan mengidentifikasi dan menganalisis jumlah pengunjung (*visitor*) serta aktivitas *visitor* di Republik Ceko terhadap fenomena *overcrowding tourism* guna menjawab rumusan masalah pertama. Sedangkan pendekatan

kedua yakni mengenai SDGs yang akan digunakan penulis dalam menjelaskan fenomena *overcrowding tourism* yang dinilai sebagai faktor penghambat bagi Republik Ceko dalam memaksimalkan pembangunan berkelanjutan di negaranya, sekaligus akan menjawab rumusan masalah kedua.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut, yakni:

1. Mengidentifikasi dampak *overcrowding tourism* terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Republik Ceko;
2. Menganalisis strategi pemerintah terhadap dampak *overcrowding tourism* di Republik Ceko

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dijabarkan sebagai berikut, yakni:

1. Memberikan kontribusi berupa informasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya kepada Mahasiswa/i yang memiliki ketertarikan terhadap isu *overcrowding tourism* dengan menggunakan analisis pendekatan *sustainable development of tourism*;
2. Sebagai acuan berpikir dalam mengkaji dan menganalisis konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan keterkaitannya dengan fenomena *overcrowding tourism* sebagai ancaman dalam

pembangunan berkelanjutan yang terjadi di suatu negara;

3. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi setiap aktor dalam hubungan internasional, yaitu kepada individu, organisasi, dan pemerintah. Baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional agar dapat dijadikan sebagai rujukan bagi yang memiliki ketertarikan terhadap topik yang diteliti oleh penulis.

1.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang akan memperjelas hubungan antara kedua variabel yang diteliti, yakni *overcrowding tourism* dan SDGs. *Overcrowding tourism* menjelaskan mengenai suatu fenomena global yang menunjukkan adanya angka wisatawan asing dalam jumlah yang besar, berkumpul di suatu wilayah / tujuan destinasi dan menimbulkan dampak negatif terhadap negara tersebut. Fenomena ini dinilai sebagai faktor penghambat suatu negara dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan negaranya secara maksimal. Sedangkan SDGs merupakan kerangka kerja global yang menjelaskan adanya tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijadikan sebagai cita-cita nasional oleh berbagai negara yang menyetujui SDGs. Konsep SDGs berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan keberlangsungan suatu negara yang merupakan tolak ukur yang penting untuk menilai tingkat kesejahteraan negara. Berikut uraian dan relevansi konsep-konsep yang dimuat dalam penelitian ini, yakni:

1.4.1 *Overcrowding Tourism*

Overcrowding tourism adalah sebuah istilah yang merujuk terhadap permasalahan pada konteks turisme. Permasalahan yang dimaksud ialah adanya jumlah wisatawan yang berlebihan pada waktu tertentu dan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang secara langsung melibatkan masyarakat dan negara. *Overcrowding tourism* umumnya terjadi di pusat-pusat kota ataupun tempat bersejarah yang banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional, khususnya para wisatawan asing.

The World Tourism Organization (UNWTO) mendefinisikan *overcrowding tourism* sebagai dampak pariwisata pada suatu destinasi yang secara berlebihan memengaruhi kualitas keberlangsungan negara dan/atau kualitas pengalaman warga terhadap pengunjung dalam konotasi yang negatif (World Tourism Organization (UNWTO), 2018). Definisi ini menunjukkan bagaimana *overcrowding tourism* dapat diamati sebagai faktor pengganggu yang membebani keberlangsungan hidup sehari-hari warga setempat maupun pengunjung lainnya yang menganggap adanya jumlah wisatawan yang berlebih sebagai suatu gangguan.

Fenomena *overcrowding tourism* kemudian menjadi isu internasional dan mulai menarik perhatian para ahli dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia untuk menjadikan fenomena ini sebagai fokus penelitiannya. Misalnya, Doxey (1975) yang berfokus pada hubungan antagonistik yang muncul antara penduduk lokal dan wisatawan, Butler (1980) yang membahas tentang siklus hidup kawasan

pariwisata dan tahapan dari pengembangan hingga penurunan pariwisata, dan O'Reilly (1986) yang fokus penelitiannya membahas mengenai daya tarik wisata dan sejauh mana destinasi wisata dapat mengatasi kunjungan wisatawan (Milano, Novelli, & Cheer, 2019). Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa para ahli memiliki ketertarikan fokus terhadap fenomena *overcrowding tourism* yang berbeda-beda, sehingga penulis menggabungkan fokus penelitian dari beberapa ahli dan kemudian menarik benang merah yang menunjukkan relevansi dengan judul yang diteliti oleh penulis.

Claudio Milano juga menggabungkan fokus penelitian dari para peneliti terdahulu dan menggambarkan perubahan yang terjadi pada berbagai destinasi wisata yang memiliki kaitan langsung dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing. Adapun perubahan yang terjadi meliputi perubahan reaksi negatif dari para penduduk lokal, perubahan fisik (infrastruktur) yang tidak diinginkan dan kerusakan terhadap sumber daya alam dan budaya, serta kepadatan umum (*general overcrowding*). Mengutip dari pendapat Milano, yakni:

“[...] *the excessive growth of visitor leading to overcrowding in areas where residents suffer the consequences of temporary and seasonal tourism peaks, which have enforced permanent changes to their lifestyles, access to amenities and general well-being.*”

Pada kutipan tersebut, dijelaskan bahwa pertumbuhan wisatawan yang berlebihan menyebabkan kepadatan penduduk di daerah-daerah dimana para

penduduk lokal diresahkan dengan konsekuensi dari puncak pariwisata yang sementara dan musiman, yang turut memaksa adanya perubahan permanen pada gaya hidup mereka, akses ke fasilitas, dan kesejahteraan umum (Dodds & Butler, 2019). Penulis menilai bahwa penggambaran perubahan negatif yang dikutip dari pendapat Millano, apabila ingin disederhanakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak *overcrowding tourism* sangat bergantung kepada jumlah *visitor* dan juga aktivitas *visitor* selama menjalani masa kunjungannya. Kedua kategori tersebut merupakan hal yang mutlak dalam melihat dampak *overcrowding tourism* terhadap pembangunan berkelanjutan.

Jumlah *visitor* merupakan bagian yang penting dalam melihat dampak *overcrowding tourism*, khususnya dalam hal kepadatan penduduk dan kenaikan harga barang/jasa yang terjadi. The Responsible Tourism Partnership menggunakan istilah *overcrowding tourism* untuk merujuk bukan hanya kepada tuan rumah atau tamu, namun juga kepada penduduk setempat maupun pengunjung yang telah sampai ke tahap resah karena sudah terlalu banyak pengunjung yang berwisata di tempat mereka tinggal (Goodwin, 2016). Sehingga, hal itu turut memengaruhi kualitas hidup yang ada di daerah tersebut dan juga kualitas pengalaman kunjungan yang cenderung memberi kesan buruk dan tidak dapat diterima oleh penduduk lokal akibat adanya kepadatan penduduk oleh wisatawan asing.

Sedangkan di sisi lain, aktivitas *visitor* juga memainkan peran yang sama pentingnya dalam melihat dampak dari *overcrowding tourism*. Berbeda halnya

dengan jumlah *visitor*, dampak dari aktivitas *visitor* lebih berfokus kepada hambatan pada pembangunan di negara mencakup tingkat kenyamanan penduduk, dan juga kelestarian sumber daya alam dan budaya. *Overcrowding tourism* seringkali dapat membahayakan pelestarian global terhadap warisan alam dan menjadi faktor penghambat dalam pembangunan berkelanjutan suatu negara.

Tinjauan pustaka di atas sebagian besar telah menunjukkan adanya identifikasi masalah yang disebabkan oleh fenomena *overcrowding tourism* dan juga hubungannya dengan masyarakat setempat maupun kondisi internal negara yang mengalami *overcrowding tourism*. Namun, adanya inisiatif penggabungan konsep *overcrowding tourism* untuk mengukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan di suatu negara belum ditemukan dalam uraian di atas. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengemukakan dampak *overcrowding tourism* sebagai faktor penghambat atau ancaman terhadap kesuksesan pembangunan berkelanjutan di suatu negara.

1.4.2 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Tahun 2015 telah menjadi tonggak sejarah bagi pembangunan global, sebab semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (*All United Nation Member States*) menyetujui Agenda 2030 mengenai Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development*) melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Adanya kesepakatan bersama yang disetujui oleh negara-negara anggota PBB, dinilai sebagai suatu bentuk perdamaian dan

kemakmuran pada masa sekarang hingga di masa depan (World Tourism Organization (UNWTO), 2019). Pembangunan Berkelanjutan ini diharapkan mampu diimplementasikan oleh masing-masing negara hingga pada tahun 2030.

SDGs adalah bentuk seruan mendesak bagi setiap negara, baik itu negara berkembang maupun negara maju untuk bersama-sama bergabung dalam satu kemitraan global melalui kerangka kerja global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan yang ekstrem, memberantas ketidaksetaraan dan ketidakadilan, memperbaiki perubahan iklim, serta berbagai tujuan lainnya yang ditargetkan hingga pada tahun 2030. Dibentuk berdasarkan kerangka kerja global sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs), SDGs merupakan kerangka kerja global dengan total 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 Target Program yang berpusat pada masyarakat (*people-centred*), transformatif (*transformative*), universal dan terintegrasi (*universal and integrated*) (United Nations: Department of Economic and Social Affairs, 2015b). Serangkaian tujuan tersebut kemudian menjadi bagian dari cita-cita nasional setiap negara yang ingin dicapai.

Dalam upaya untuk mencapai pembangunan global yang ideal dan merata bagi setiap negara, ruang lingkup dari Konsep SDGs tercantum kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi dasar pembentukan SDGs. Berdasarkan yang tercantum pada situs resmi United Nations: Department of Economic and Social Affairs, berikut adalah 17 Tujuan SDGs, yakni:

1. Menghapus Kemiskinan (*No Poverty*)
2. Mengakhiri Kelaparan (*Zero Hunger*)
3. Kesehatan Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-Being*)
4. Pendidikan Bermutu (*Quality Education*)
5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)
6. Akses Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*)
7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)
9. Infrastruktur, Industri, dan Inovasi (*Industry, Innovation, and Infrastructure*)
10. Mengurangi ketimpangan (*Reduce Inequalities*)
11. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*)
13. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)
14. Menjaga Ekosistem Laut (*Life Below Water*)
15. Menjaga Ekosistem Darat (*Life on Land*)
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat (*Peace, Justice, and Strong Institutions*)
17. Kemitraan untuk Menggapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)

Salah satu sektor yang merupakan ruang lingkup dari penerapan SDGs ialah sektor pariwisata. Namun dalam keterkaitannya, sektor pariwisata secara khusus memiliki kaitan yang erat dengan upaya realisasi SDGs nomor 8, 12, dan 17. Ketiga SDGs tersebut secara garis besar berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan (*Sustainable*

Consumption and Production), serta kemitraan demi menggapai tujuan SDGs. Sektor pariwisata dan konsep SDGs memiliki keterlibatan satu sama lain yang kemudian membentuk pola hubungan yang berkaitan dengan erat (World Tourism Organization (UNWTO), 2018). Ketiga SDGs yang telah dijabarkan di atas umumnya mendapatkan pengaruh yang signifikan dari sektor pariwisata dan turisme.

Untuk mencapai Agenda 2030 mengenai Pembangunan Berkelanjutan, diperlukan kerangka tindak lanjut dan tinjauan mengenai *progress* realisasi SDGs yang dioperasikan pada tiga tingkatan yaitu tingkat nasional, tingkat kawasan (*regional*), dan global. Pada tingkat nasional, masing-masing pemerintah negara akan melakukan peninjauan kemajuan secara teratur dan inklusif, baik di tingkat nasional dan subnasional. Sementara itu, pada tingkat kawasan, Agenda 2030 mengakui adanya peran penting kawasan dalam mempromosikan integrasi dan kerjasama negara-negara anggota kawasan yang kemudian diterjemahkan sebagai tujuan global dalam realitas pembangunan berkelanjutan nasional.

Komisi regional PBB turut mengadakan Forum Regional untuk tindak lanjut Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai tinjauan regional terhadap Agenda 2030. Forum regional ini bersifat *multistakeholder* yang mencakup Negara Anggota, UN Systems, *Major Groups* dan *Stakeholder* lainnya. Sedangkan pada tingkatan global, kerangka tindak lanjut SDGs dioperasikan melalui Forum Politik Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (*the United Nations High-Level Political*

Forum on Sustainable Development) atau yang biasa disingkat HLPF, berfungsi sebagai platform sentral untuk melaksanakan tindak lanjut dan tinjauan yang didukung oleh tinjauan komisi fungsional ekonomi dan sosial (ECOSOC) serta forum antar pemerintah lainnya (UNITED NATIONS, 2020). Realisasi Agenda 2030 dilaksanakan secara sistematis dengan melibatkan lebih dari satu *stakeholder* dan diimplementasikan kepada tiga tingkatan.

Dalam penerapan kerangka kerja global SDGs, para Negara Anggota menjalankan konsep SDGs dengan *Bottom Up Approach*, yaitu dimulai pada tingkat nasional, lalu ke tingkat kawasan, dan berpusat pada tingkat global. Di tingkat nasional, banyak negara yang telah mengarusutamakan SDGs ke dalam rencana dan strategi nasionalnya, serta menciptakan mekanisme koordinasi guna menyukseskan implementasi SDGs di negaranya. Negara juga merancang kerangka pemantauan nasional, dan bahkan dalam beberapa kasus tertentu, negara turut menetapkan strategi evaluasi terkait SDGs. Beberapa pemerintah juga menentukan format, frekuensi dan metodologi untuk persiapan tinjauan serta laporan nasional mengenai kemajuan SDGs di negaranya.

Pada tingkat kawasan, kemajuan realisasi SDGs telah dicapai dalam pengembangan tindak lanjut dan tinjauan arsitektur Negara Anggota, termasuk melalui Forum Regional untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Regional Forum on Sustainable Development*). Sementara di tingkat global, sesi HLPF diadakan pada bulan Juli di setiap tahun, dan tuan rumah akan melaporkan *Voluntary National*

Review (VNRs), menulis laporan kemajuan SDGs tahunan, dan masukan dari *Major Groups* serta Pemangku Kepentingan lainnya. Adapun tujuan dari VNR ialah untuk memfasilitasi Negara Anggota berupa tambahan informasi mengenai kemajuan SDGs di setiap negara, termasuk keberhasilan dan tantangan dalam penerapan SDGs dengan maksud untuk mempercepat pelaksanaan Agenda 2030 (UNITED NATIONS, 2020). Tinjauan berkala yang dilakukan terhadap kemajuan SDGs, tidak hanya memonitor kemajuan dari tujuan yang diimplementasikan, akan tetapi turut membantu negara untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana program kerja, strategi nasional serta kebijakan masing-masing negara dalam menyesuaikan SDGs dengan keadaan nasional.

Maka dari itu, dalam hal memantau dan mengevaluasi kemajuan dari SDGs, seringkali hal tersebut menimbulkan beberapa tantangan pada tingkat lokal dan subnasional pemerintah. Sebab, ada banyak kemungkinan perbedaan yang terjadi di masing-masing kota di setiap negara, termasuk perbedaan geografis, sosial ekonomi dan juga pemerintahan yang membuat sulit untuk menentukan indikator keberhasilan yang berlaku secara global dalam menilai kemajuan SDGs di setiap negara (Woodbrige, 2015). Selain itu, dikarenakan implementasi dari SDGs sebagian besar dilaksanakan pada tingkat nasional, maka indikator yang berbeda dari masing-masing negara tentu saja diperlukan. Oleh sebab itu, masing-masing dari 17 SDGs memiliki target dan indikator yang beragam.

Setiap kemajuan yang terdapat dari masing-masing SDGs akan diukur melalui seperangkat indikator yang diselaraskan secara global, mengikuti kategori dan fokus tujuan dari masing-masing SDGs. Agenda 2030 mengenai Pembangunan Berkelanjutan mencakup 231 indikator keberhasilan dari 169 Target Program yang terbagi kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Kitzmuller, Stacy, & Mahler, 2021). Indikator keberhasilan ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai kemajuan dari tujuan SDGs yang ingin dicapai dan memudahkan setiap negara dalam mengidentifikasi tantangan maupun faktor keberhasilan dari penerapan SDGs di negaranya

Dalam mengidentifikasi isu *overcrowding tourism*, penulis akan menggunakan pendekatan teori pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable development of tourism*) yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan yang memiliki keterkaitan yang erat dengan SDGs. Sehingga melalui teori pembangunan pariwisata berkelanjutan ini, fokus teorinya ialah untuk mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari aktivitas pariwisata.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novotna et al memfokuskan teori pembangunan pariwisata berkelanjutan pada strategi berupa alternatif pada turisme (*alternative tourism*), kelayakan (*ethical*), dan pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan (*environmentally responsible tourism*). Ketiga fokus tersebut dipercaya dapat membantu mengatasi permasalahan berupa tantangan pada sektor pariwisata (Novotna et al., 2019). Oleh karena itu, penulis memilih pendekatan

pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam menganalisis isu *overcrowding tourism*.

Agar memperkuat analisis teori, penulis juga menggunakan pendapat dari David Weaver mengenai teori pembangunan pariwisata berkelanjutan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Novotna et al, Weaver juga berpendapat bahwa alternatif pada turisme diperlukan guna mengatasi berbagai masalah yang muncul dari sektor pariwisata. Melalui pendapat Weaver pula dikatakan bahwa pada teori pembangunan pariwisata berkelanjutan diperlukan kontrol kualitas (*quality control*) berupa adanya mekanisme seperti penetapan peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah (Weaver, 2006). Tak hanya melalui peraturan dan undang-undangan, akan tetapi kontrol kualitas terhadap destinasi wisata dapat pula dilakukan melalui penetapan kode etik pariwisata.

Weaver juga membahas mengenai diperlukannya strategi manajemen pengunjung terhadap tujuan wisata (*visitor management strategies for destinations*), sebab untuk mengefektifkan pengalaman berkunjung para wisatawan, dibutuhkan suatu strategi yang mengatur mengenai pengelolaan pengunjung dan arus kunjungan turisme. Strategi ini mencakup opsi pembatasan jumlah pengunjung melalui penerapan kuota formal, adanya biaya kunjungan, dan pembatasan yang disengaja terhadap infrastruktur pariwisata dan berbagai layanan lainnya (Weaver, 2006). Melalui teori pembangunan pariwisata berkelanjutan, penulis memilih teori ini untuk menganalisis fenomena *overcrowding tourism*.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teori pembangunan pariwisata berkelanjutan yang merupakan bagian dari SDGs dengan berfokus kepada tiga dari tujuh belas tujuan SDGs yang dianggap memiliki kaitan yang erat dengan sektor pariwisata untuk menganalisis hubungan timbal balik antara upaya realisasi dari ketiga tujuan SDGs yang ingin dicapai oleh suatu negara, dan hambatan realisasi yang dialami oleh negara yang berasal dari sektor pariwisata.

1.4.3 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen pada penelitian. Variabel independen dapat juga menjadi sebab dari perubahan yang menyebabkan timbulnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen yang dimaksud merupakan variabel yang dipengaruhi atau dapat pula dikatakan sebagai variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas pada penelitian. Variabel independen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dampak *Overcrowding Tourism*.

Sementara itu, variabel dependen yang dimaksud ialah Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) di Republik Ceko. Peneliti akan menentukan tiga dari tujuh belas tujuan SDGs yang memiliki korelasi paling erat dengan judul penelitian sebagai variabel dependen yang akan menjadi fokus penelitian. Kedua variabel ini akan dianalisis pada level negara menggunakan dua pendekatan pengaruh dampak *overcrowding tourism* yang paling signifikan, yakni

jumlah *visitor* dan aktivitas *visitor* dalam uraian operasionalisasi variabel sebagai berikut, yakni:

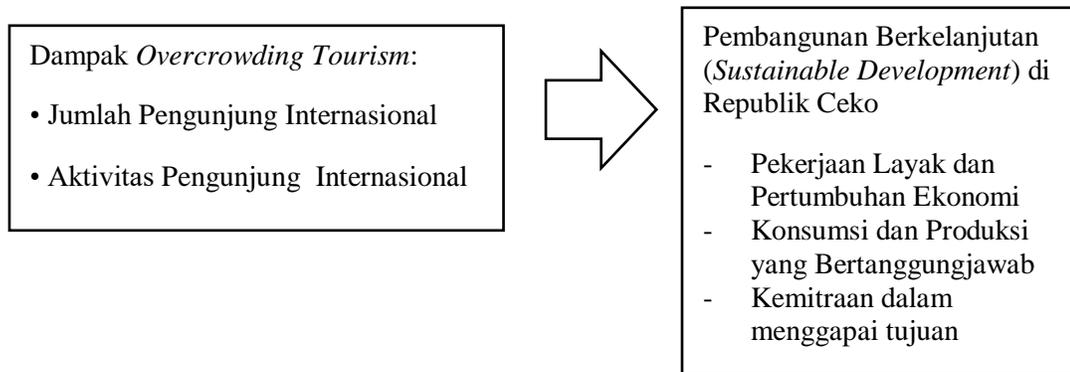
Tabel 1. 2 Operasionalisasi Variabel

Variabel Dependen		Variabel Independen	Kategori	Indikator
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (<i>Decent Work and Economic Growth</i>)	Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>) di Republik Ceko	<i>Overcrowding Tourism</i>	Jumlah Pengunjung Internasional	Dampak terhadap Kenaikan Harga Barang/Jasa
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab (<i>Responsible Consumption and Production</i>)				Dampak terhadap Kepadatan Wilayah
Kemitraan Demi Menggapai Tujuan (<i>Partnership for the Goals</i>)			Aktivitas Pengunjung Internasional	Dampak terhadap Aktivitas Ekonomi Pengunjung
				Dampak terhadap Kenyamanan Objek Wisata

Kedua aspek yang telah dijabarkan sebelumnya akan diproyeksikan dalam proses analisis data, sehingga dapat dikemukakan bahwa adanya pengaruh fenomena *overcrowding tourism* dan dampaknya dalam memengaruhi implementasi pembangunan berkelanjutan di Republik Ceko. Pertama, jumlah *visitor* akan digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Republik Ceko dan juga menganalisis dampak yang ditimbulkan

akibat penambahan jumlah wisatawan asing. Selanjutnya aktivitas *visitor*, digunakan untuk menunjukkan pengaruh dampak *overcrowding tourism* yang memberi kesan negatif, baik terhadap lingkungan maupun mencakup kenyamanan objek wisata yang diakses oleh penduduk lokal dan wisatawan asing. Aktivitas *visitor* juga akan menunjukkan relevansi hubungan yang terjadi antara pengaruh negatif yang muncul dari aktivitas wisatawan asing dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan SDGs, khususnya terhadap ketiga tujuan SDGs yang berfokus pada kondisi ekonomi, pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta kemitraan demi menggapai tujuan SDGs di Republik Ceko.

1.4.4 Model Analisis



1.4.5 Asumsi dan Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka konsep dan operasionalisasi variabel yang telah dibahas sebelumnya, penulis berasumsi bahwa dampak yang ditimbulkan dari fenomena *overcrowding tourism* dapat menjadi hambatan dan ancaman terhadap optimalisasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Republik

Ceko. Maka dari itu, penelitian ini berorientasi pada hipotesis kerja sebagai berikut:

1. Pola hubungan dan relevansi yang terbentuk antara fenomena *overcrowding tourism* dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam upaya optimalisasi SDGs di Republik Ceko;
2. Strategi pemerintah Republik Ceko terhadap *overcrowding tourism* yang menjadi ancaman terhadap upaya pemerintah setempat dalam menggapai realisasi SDGs di Republik Ceko.
3. *Overcrowding tourism* memberi dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Republik Ceko.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis ialah tipe penelitian melalui pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian dengan terperinci dan dijabarkan secara deskriptif analitik. Penggunaan metode kualitatif bertujuan guna mendapatkan penggambaran mengenai teknik dan juga proses terhadap penyelidikan non statistik dalam mengumpulkan data tentang fenomena sosial (McNabb, 2015). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang bertujuan untuk membantu penulis dalam mengeksplorasi fenomena yang diteliti serta menjelaskan fenomena tersebut melalui data berupa kata-kata dan gambar.

1.5.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data penelitian yang didapatkan secara langsung melalui sumber pertama (tanpa perantara). Data tersebut diperoleh dari individu maupun kelompok yang bersangkutan dengan topik melalui jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Penulis memperoleh data primer melalui metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan antara penulis dengan sumber pertama. Metode wawancara mendalam yang dimaksud ialah suatu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan pertanyaan lisan yang secara langsung ditanyakan kepada sumber pertama guna mendapatkan data maupun informasi yang dibutuhkan. Sedangkan data sekunder ialah data penelitian yang diperoleh dari sumber literatur dengan topik yang berkaitan dengan objek penelitian penulis (Khasanah, 2021). Data tersebut bersumber dari buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, situs-situs internet yang berkaitan dengan penelitian maupun laporan resmi yang kredibel.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan pengolahan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara bersama sumber pertama. Melalui teknik studi kepustakaan, penulis akan mengumpulkan data dari beberapa sumber literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada penelitian penulis. Literatur yang akan digunakan

sebagai sumber bacaan berupa buku, jurnal, artikel, dokumen, berbagai situs di internet maupun laporan resmi yang berhubungan dengan topik yang diteliti oleh penulis (McNabb, 2015). Sedangkan untuk data primer, data penelitian akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang akan dilaksanakan melalui Zoom Cloud Meetings atau platform *video conference* lainnya. Transkrip dari hasil wawancara antara penulis dengan sumber pertama akan diolah oleh penulis sebagai data primer penelitian yang kemudian data-data tersebut dikumpulkan di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang diteliti dengan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Kemudian, fakta-fakta tersebut akan dihubungkan dengan fakta lainnya agar sebuah argumen yang tepat dapat dihasilkan. Melalui teknik ini pula penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis angka serta data statistik lainnya sebagai penunjang argumen dan hasil akhir penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah uraian sistematika penulisan penelitian yang terbagi ke dalam lima bab, yakni:

BAB 1 Pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka akan mengulas lebih jauh lagi mengenai konsep-konsep ataupun teori yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari ulasan tersebut ialah untuk menemukan variabel yang akan memengaruhi kajian yang akan diteliti.

BAB 3 Gambaran Umum mengenai sejarah *Overcrowding tourism* di Republik Ceko dan pembangunan berkelanjutan di Republik Ceko.

BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian pada bab ini operasionalisasi variabel yang dikemukakan di bab 1 akan diimplementasikan terhadap data-data guna menemukan jawaban dan justifikasi atas pertanyaan penelitian yang diangkat.

BAB 5 Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan serta memvalidasi kembali asumsi dan hipotesis yang telah diproyeksikan di awal penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Overcrowding Tourism

Istilah “*overcrowding tourism*” digunakan untuk menggambarkan fenomena yang berkaitan erat dengan perkembangan pariwisata dalam beberapa dekade terakhir dan hubungannya dengan dampak yang ditimbulkan dari konsentrasi arus pariwisata pada destinasi wisata utama yang tersebar di seluruh dunia (Capocchi, Vallone, Pierotti, & Amaduzzi, 2019). Istilah *overcrowding tourism* juga berkaitan dengan berbagai isu dan tata kelola mengenai fenomena pariwisata.

Mengutip pendapat Capocchi et al, istilah *overcrowding tourism* belum memiliki karakterisasi yang paten dan diakui oleh banyak pihak. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mendefinisikan indikator guna menjelaskan fenomena *overcrowding tourism*, maka Capocchi et al mempertimbangkan tiga faktor yang saling berkaitan, yakni:

1. Pertumbuhan (*growth*);
2. Konsentrasi (*concentration*);
3. Tata kelola atau pemerintahan (*governance*).

Indikator yang pertama yaitu pertumbuhan berfokus kepada peningkatan kepentingan pada sektor pariwisata yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir di seluruh dunia. Pertumbuhan pariwisata ini sebagian ditandai dengan adanya arus turis yang masif dan juga “efek imitasi” (*imitation effect*) dari negara-negara berkembang yang sehubungan dengan perilaku turis terhadap ekonomi negara barat (*tourist*

behavior of Western economy). Indikator yang kedua ialah konsentrasi. Adanya pertumbuhan angka turisme dan arus wisatawan yang masif menyebabkan terjadinya konsentrasi terhadap kedatangan turis pada destinasi pariwisata yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah terhadap kepadatan penduduk, gangguan daya tampung (*carrying capacity*), dan kelestarian lingkungan. Indikator yang ketiga yaitu tata kelola. Secara garis besar, faktor tata kelola berhubungan dengan masalah pemerintahan yang kerap kali berkaitan dengan sumber daya wilayah serta hubungannya dengan maspakai penerbangan (*airlines carriers*), biaya hidup, dan teknologi yang mendukung aktivitas pariwisata (Capocchi et al., 2019). Ketiga faktor yang dikemukakan oleh Capocchi et al ini kemudian dirumuskan menjadi indikator dalam mengukur dampak dari fenomena kepadatan wilayah yang disebabkan oleh wisatawan asing agar fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai *overcrowding tourism*.

Meskipun para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda dan sepakat bahwa *overcrowding tourism* adalah fenomena yang kompleks dan tidak memiliki indikator yang tetap dalam mengukur fenomena tersebut, namun guna mendukung indikator yang dirumuskan oleh Capocchi et al, penulis juga mengutip pendapat dari Weber et al. Menurut Weber et al, bahaya dari *overcrowding tourism* telah diidentifikasi pada tahun 1979 oleh Rosenow and Pulshiper yang menghubungkan fenomena ini dengan tiga faktor utama (Weber et al., 2019), yakni:

1. Jumlah wisatawan asing;
2. Aktivitas wisatawan asing;
3. Ekonomi wisatawan asing.

Sejalan dengan temuan para ahli bahwa kepadatan destinasi pariwisata tidak semata-mata disebabkan oleh jumlah wisatawan asing, akan tetapi adanya faktor-faktor seperti perilaku pengunjung, waktu kunjungan, lokasi wisata, pengalaman pariwisata, hingga hubungannya dengan etika terhadap penduduk lokal. Selain itu, infrastruktur dan kapasitas untuk menampung aktivitas pariwisata dalam jumlah yang besar termasuk juga kedalam faktor penting yang dapat mengurangi atau meningkatkan dampak negatif dari fenomena *overcrowding tourism*.

Terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan pada lingkungan, *overcrowding tourism* turut menekan penduduk lokal melalui pembatasan ruang gerak dalam kehidupan sehari-hari serta yang menyebabkan kenaikan harga dan kenaikan biaya hidup yang menjadi gambaran dari indikator ketiga (Weber et al., 2019). Pada akhirnya, dampak negatif tersebut memengaruhi pariwisata berkelanjutan dan membahayakan destinasi wisata dalam jangka panjang.

Sementara itu, isu *overcrowding tourism* menjadi isu yang penting dalam beberapa tahun terakhir di kalangan para akademika. Konsep ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai konsep yang masih “ambigu” karena tidak memiliki definisi yang paten, berbeda-beda, dan sangat sulit untuk dioperasionalkan. Dengan demikian,

konsep *overcrowding tourism* sering kali digunakan sebagai konsep untuk melegitimasi ide-ide yang berkaitan dengan pariwisata.

Lebih khusus lagi, sejak tahun 1990-an dan seterusnya, perdebatan mengenai isu *overcrowding tourism* lebih menekankan kepada tanggung jawab dari para pelaku di sektor pariwisata, termasuk wisatawan asing. Berdasarkan alasan ini, Koens et al turut memberikan beberapa kontribusi literatur yang mencakup fungsi sektor pariwisata sebagai suatu sektor yang berfokus pada kegiatan sosial-ekonomi. Dalam pengamatannya, Koens et al menemukan bahwa istilah *overcrowding tourism* sebagian besar bermunculan di berbagai media khususnya media sosial. Adapun penggambaran masalah pada media ialah berupa dampak negatif yang berlebihan dari sektor pariwisata terhadap penduduk lokal dan/atau lingkungan. Masalah ini yang kemudian menjadi fokus perhatian dalam dunia akademisi selama bertahun-tahun.

Apabila dampak dari pariwisata terhadap lingkungan dapat diamati dengan lebih mudah, maka akan lebih sulit untuk mengukur dampak pariwisata terhadap hubungan sosial masyarakat. Sebab, hal ini berhubungan langsung dengan toleransi penduduk lokal terhadap wisatawan asing. Melalui kajian literatur Koens et al, terdapat perspektif alternatif mengenai *overcrowding tourism* berupa adanya tingkat perubahan yang dapat diterima atau *levels of acceptable change framework* (LAC) yang dapat memberikan nuansa yang lebih signifikan. LAC bertujuan untuk menghargai dampak pariwisata yang dapat diterima oleh pemangku kepentingan lokal (*local stakeholders*) dalam kaitannya dengan isu *overcrowding tourism* (Koens,

Postma, & Papp, 2018). Misalnya, pada fase krisis finansial, masyarakat akan cenderung untuk lebih toleran terhadap dampak negatif pariwisata karena adanya potensi ekonomi dari sektor pariwisata.

Adapun manfaat dari perdebatan mengenai LAC ialah adanya pembuktian bahwa penekanan fenomena *overcrowding tourism* telah bergeser dari yang semula berfokus kepada angka dan kuantitas pengunjung, kini lebih didasarkan kepada manfaat dan kerugian yang dapat dirasakan. Alternatif ini telah menyebabkan pola berpikir yang berbeda mengenai cara mengelola pariwisata. Bukan lagi hanya berfokus kepada pembatasan jumlah pengunjung, UNWTO kini berfokus kepada peningkatan kapasitas kegiatan berwisata (Koens et al., 2018). Kapasitas berwisata dapat ditingkatkan dengan memperbesar kapasitas daya tampung tempat wisata atau dengan menyadarkan masyarakat setempat mengenai potensi memperoleh keuntungan finansial dengan membangkitkan wirausahawan lokal.

Koens et al turut berpendapat bahwa daripada berfokus kepada jumlah pengunjung asing secara mutlak, kekhawatiran yang paling nampak justru kepada pertumbuhan yang relatif cepat dan/atau pertumbuhan tidak terduga. Hal ini dapat diamati pada daerah wisata yang baru berkembang. Daerah tersebut dapat menerima wisatawan yang relatif sedikit dan memiliki fasilitas wisata yang terbatas serta populasi penduduk lokal yang tidak terbiasa atau bahkan tidak menginginkan adanya pertumbuhan pariwisata di daerah tersebut. Akan tetapi kemunculan Instagram dan media sosial lainnya dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan angka wisatawan

asing secara tak terduga. Misalnya jika daerah tersebut dipromosikan oleh *influencer* populer (Koens et al., 2018). Temuan yang dikemukakan oleh Koens et al mengkonfirmasi mengenai gangguan daya tampung (*carrying capacity*) sebagai indikator untuk mengukur dampak pariwisata yang dapat berfungsi sebagai peringatan bagi otoritas kota yang berupaya untuk mengelola tujuan pariwisata.

Tak jauh berbeda dengan Koens et al, penelitian yang dilakukan oleh Benner mengemukakan bahwa perdebatan mengenai *overcrowding tourism* pada tingkat teoritis khususnya mengenai keberlanjutan budaya, sosial, dan lingkungan dari fenomena pertumbuhan angka wisatawan yang tumbuh secara permanen bukanlah hal yang baru. Adanya tingkat kesadaran tentang kemungkinan dari dampak negatif yang disebabkan oleh pertumbuhan angka wisatawan massal secara kuantitatif dianggap sebagai perdebatan yang sebelumnya tidak dibahas oleh para ahli terdahulu. Penelitian terkait hal tersebut dianggap penting dan relevan karena penelitian ini dapat dikembangkan untuk mendukung para pembuat kebijakan yang kemudian memiliki hubungan dengan strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan di masa depan.

Menurut Benner, potensi risiko yang berkaitan dengan *overcrowding tourism* dapat mencakup naiknya biaya hidup serta properti perumahan (paling tidak melalui penggunaan platform *sharing-economy*) yang pada akhirnya dapat menyebabkan dampak negatif berupa gentrifikasi, kepadatan pada infrastruktur dan transportasi, penurunan identifikasi penduduk lokal dengan wilayahnya, hilangnya unsur otentik

terhadap suatu destinasi, kerusakan substansial pada warisan budaya maupun lingkungan, atau adanya privatisasi ruang yang seharusnya dapat diakses secara publik (Benner, 2019). Tampaknya hal ini menunjukkan bahwa destinasi yang dibebani dengan angka pertumbuhan wisatawan asing secara kuantitatif dapat memengaruhi pembangunan pariwisata yang lebih aktif dan berkelanjutan.

Benner dalam penelitiannya turut mengamati mengenai bagaimana asal mula perdebatan yang saat ini tengah memengaruhi fenomena *overcrowding tourism* dapat dikaitkan dengan diskusi tentang batas pertumbuhan (*limits of growth*) yang pertama kali dimulai pada tahun 1972 melalui publikasi laporan tahunan Club of Rome yaitu sebuah organisasi informal yang berfokus kepada masalah kemanusiaan. Bagi Benner, debat publik yang terjadi pada saat ini mengenai *overcrowding tourism* dapat memainkan peran yang sama dengan laporan Club of Rome pada tahun 1972 dan diskusi yang ada di tahun berikutnya. Dalam tujuan wisata berkelanjutan yang ditandai dengan dampak negatif dari *overcrowding tourism*, terdapat konsensus terdahulu yang membahas mengenai tujuan peningkatan angka pariwisata secara kuantitatif guna memaksimalkan manfaat ekonomi pariwisata yang disepakati tanpa sepenuhnya mempertimbangkan adanya kemungkinan efek samping yang mampu merusak aspek sosial, budaya dan ekologi (Benner, 2019). Sebab, lingkungan secara langsung telah mendapatkan tekanan yang kuat dari penduduk lokal akibat terjadinya *overcrowding tourism*.

Dalam upaya untuk menjaga manfaat ekonomi pariwisata, diperlukan pergeseran fokus pembangunan berkelanjutan pariwisata ke arah pertumbuhan kualitatif. Menarik segmen pasar melalui nilai lokal yang lebih tinggi akan diperlukan untuk menyeimbangkan efek ekonomi yang diinginkan agar dapat menghasilkan nilai lokal tersendiri (Benner, 2019). Sebagai nilai tambah akan hal ini, penerimaan pajak (*tax revenues*), ketenagakerjaan (*employment*) dan keberlanjutan pada sektor sosial, budaya, dan lingkungan sangat diperlukan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan secara jangka panjang.

Berbeda dengan pendapat para ahli yang telah dikutip sebelumnya, Croce justru berpendapat bahwa *overcrowding tourism* dapat membawa dampak positif terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan khususnya pada sektor ekonomi, namun tetap memiliki kemungkinan untuk menyebabkan dampak negatif apabila fenomena *overcrowding tourism* tidak dapat ditangani dengan baik. Sektor ekonomi dianggap memainkan peran paling signifikan pada fenomena *overcrowding tourism*. Sebab, melalui sektor ini pula kita dapat mengukur kerugian maupun keuntungan secara jelas yang disebabkan oleh fenomena *overcrowding tourism*. Ekonomi dianggap penting karena dapat memengaruhi sektor lainnya seperti kualitas hidup penduduk lokal maupun kelestarian alam dan lingkungan.

Croce berpendapat bahwa apabila sektor pariwisata global ingin memantapkan posisinya sebagai pendorong utama suatu perubahan, maka diperlukan pendekatan baru pada pembangunan ekonomi yang mampu menghasilkan kenaikan harga seperti

adanya konservasi maupun pelestarian dan perlindungan pada budaya serta lingkungan (Croce, 2018). Berdasarkan hal ini, maka sumber daya alam dan budaya merupakan sumber kehidupan pariwisata sementara pariwisata turut berkontribusi dalam melindungi warisan alam dan budaya suatu destinasi wisata.

Melalui pemikiran ini, pembangunan berkelanjutan khususnya pada bidang sosial dan lingkungan akan menjadi suatu paradoks paling nyata dari sektor global. Dalam menghadapi tekanan guna meminimalisir dampak negatif dari apa yang disebut sebagai “*overcrowding tourism*,” sektor pariwisata global dituntut untuk mengubah tantangan menjadi suatu peluang baru untuk pertumbuhan. Sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dunia yang paling menjanjikan, penerapan praktik pembangunan berkelanjutan pada sektor pariwisata dianggap sangat penting. Tak hanya untuk memberi contoh, tetapi juga penting untuk mengembangkan sektor ekonomi yang terkait dengan ekonomi pengunjung (*visitor economy*).

Pada konteks global, seiring berjalannya waktu sektor pariwisata telah mengadopsi berbagai perubahan dari inovasi teknologi, bahkan di antara usaha mikro (*micro and small enterprises*). Adanya adopsi pada teknologi turut memprakarsai inovasi pada model bisnis seperti maskapai penerbangan berbiaya rendah (*low-cost airlines*) dan *peer-to-peer accommodation* dimana kedua model bisnis ini dapat merangsang daya saing dan memulai siklus pertumbuhan pariwisata yang baru (Croce, 2018). Perilaku ekonomi seperti ini dapat pula menginspirasi perkembangan

rantai nilai (*value chains*) dan klaster ekonomi yang berkembang pesat guna mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

Sementara itu, Ove Oklevik melakukan penelitian terhadap fenomena *overcrowding tourism* untuk memberikan kontribusi pemikiran melalui sudut pandangannya mengenai fenomena yang sedang marak diperdebatkan pada sektor pariwisata. Oklevik et al dalam penelitiannya membahas bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pertumbuhan pesat secara berkelanjutan terhadap tingkat kedatangan wisatawan asing di berbagai tujuan wisata populer dan hal tersebut berkaitan dengan masalah kepadatan penduduk, inflasi lokal, dan tekanan pada tempat tinggal penduduk lokal (*residential housing*) yang telah memancing perdebatan publik mengenai keinginan untuk mewujudkan suatu sistem pariwisata yang berdasarkan pada model pertumbuhan.

Peningkatan pariwisata di beberapa destinasi wisata baru-baru ini sering kali dipicu oleh adanya kombinasi keterlibatan aksesibilitas yang meningkat dari maskapai berbiaya rendah dan penurunan pada tarif penerbangan. Tak hanya kedua faktor tersebut, maraknya penggunaan media sosial yang mencakup kebebasan beropini dapat memengaruhi keinginan seseorang untuk berwisata (Oklevik et al., 2019). Fasilitas lain yang dapat meningkatkan pengalaman berwisata seperti terjemahan bahasa (*language translation*), pemandu wisata, serta penawaran akomodasi terjangkau melalui AirBnB dan platform *online* lainnya berkontribusi

dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang hendak melakukan aktifitas berwisata, khususnya berwisata ke destinasi wisata yang populer.

Semua fasilitas dan perkembangan tersebut telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam memengaruhi indikator pengunjung (*visitor composition*), seperti masa kunjungan (*length of stay*), tempat berwisata (*place of stay*), ekspektasi wisatawan asing, serta persepsi penduduk lokal terhadap wisatawan, khususnya jika Airbnb yang ditempati oleh wisatawan asing menyebabkan gangguan pada pemukiman penduduk lokal. Seluruh rangkaian proses ini menghasilkan perspektif yang lebih kritis mengenai keinginan dan kualitas pertumbuhan pariwisata yang ingin diwujudkan oleh beberapa pemangku kepentingan destinasi wisata, termasuk bisnis dan penduduk lokal maupun wisatawan asing (Oklevik et al., 2019). Dengan meluasnya pemberitaan mengenai *overcrowding tourism*, kepadatan penduduk, dan sentimen terhadap wisatawan asing, maka organisasi pemasaran destinasi wisata khususnya di kawasan Eropa secara terbuka telah mendiskusikan keinginannya untuk mewujudkan perspektif yang berfokus kepada pertumbuhan berkelanjutan pada pariwisata.

Tinjauan pustaka mengenai konsep *overcrowding tourism* serta indikator-indikator yang dikemukakan oleh berbagai ahli dalam mengukur fenomena *overcrowding tourism* akan dijadikan rujukan oleh penulis dalam mengevaluasi dampak negatif *overcrowding tourism* terhadap pembangunan berkelanjutan di Republik Ceko, sekaligus menjadikan indikator-indikator tersebut sebagai referensi

dalam menentukan kategori dan indikator dari operasionalisasi variabel penulis pada penelitian ini.

2.2 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (The UN 2030 Agenda for Sustainable Development) terbentuk melalui Sidang Umum PBB ke-70 pada September 2015, dimana pada sidang tersebut ditetapkan serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). 17 SDGs yang mendasari agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan memiliki 169 target yang saling berkaitan dan target tersebut mencakup berbagai aspek, yaitu: tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, dan melindungi planet. SDGs terdiri dari beragam jenis tata kelola global yang mencakup fitur penetapan tujuan sebagai strategi dalam tata kelola inti yang melalui proses penetapan tujuan inklusif, sifat SDGs yang tidak mengikat, pengaturan kelembagaan yang terkesan lemah, dan fleksibilitas ekstensif yang dapat dinikmati oleh pemerintah dalam pengimplementasiannya (Biermann, Kanie, & Kim, 2017). Walaupun SDGs memiliki potensi yang besar, keberhasilan kolektif dari SDGs akan bergantung pada sejumlah faktor kelembagaan seperti sejauh mana negara memformalkan komitmen mereka dan memperkuat tata kelola globalnya.

Secara hakikat, pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang dapat dinikmati antar generasi, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan

memiliki tujuan utama ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pemenuhan aspirasi manusia secara umum (Arida, 2016). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mengharuskan terjadinya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta ketersediaan kesempatan bagi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Adapun kemunculan SDGs ditandai sebagai instrumen pembangunan lanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). Kemunculan MDGs sebagai upaya global pada tahun 2000 berfokus untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, pencegahan penyakit, dan memperluas pendidikan dasar untuk semua anak. Meskipun dalam implementasinya relatif berhasil jika dinilai dengan indikator nasional, tinjauan mengenai MDGs menyoroti kegagalan dalam mengintegrasikan hak asasi manusia dan mencapai kesetaraan serta pemberdayaan gender secara memadai untuk wanita. Pada implementasi MDGs, masih ditemukan kesenjangan yang semakin jauh antara yang kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan serta mereka yang berasal dari kelompok minoritas (Amnesty International, 2013). Oleh sebab itu, perbedaan utama antara MDGs dan SDGs ialah SDGs memiliki agenda yang lebih universal yang berlaku untuk semua negara, dibandingkan MDGs yang berfokus pada negara berkembang.

Implementasi dari SDGs (17 tujuan dan 169 target) jauh lebih rinci daripada ketentuan yang terkandung dalam MDGs. Pada SDGs, target yang dimaksud termasuk membahas mengenai keuangan, peningkatan kapasitas, perdagangan, dan beberapa masalah sistemik seperti kebijakan dan kelembagaan, kemitraan *multi-*

stakeholder serta mencakup data, pemantauan dan akuntabilitas (Nanda, 2016). Misalnya dalam peninjauan SDGs, Dewan Internasional untuk Pengetahuan dan Dewan Ilmu Sosial Internasional (the International Council for Science and the International Social Science Council) mengemukakan bahwa SDGs mengatasi hambatan sistemik terhadap pembangunan berkelanjutan yang terabaikan oleh MDGs, termasuk hambatan mengenai kapasitas kelembagaan yang lemah.

SDGs dianggap sebagai suatu kerangka kerja untuk promosi dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Sektor pariwisata memiliki potensi untuk berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masing-masing tujuan dari 17 tujuan SDGs. Pariwisata diidentifikasi memainkan peran yang sangat penting dalam merealisasikan tujuan SDGs nomor 8 mengenai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, nomor 12 mengenai Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, dan nomor 17 mengenai Kemitraan dalam Menggapai Tujuan (Rasoolimanesh, Ramakrishna, Hall, Esfandiar, & Seyfi, 2020). Walaupun sektor pariwisata dapat berkontribusi kepada 17 tujuan SDGs, akan tetapi dampaknya masih sulit diukur mengingat tidak adanya indikator universal bagi setiap bisnis maupun sektor pariwisata yang dapat mengukur dan memantau seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Meskipun potensi sektor pariwisata teridentifikasi dapat membantu kemajuan dari SDGs, beberapa pembuat kebijakan di sektor pariwisata baik di negara maju maupun negara berkembang tampaknya kini sedang aktif terlibat dalam perencanaan implementasi SDGs skala nasional. Terdapat keterlibatan penuh dari sektor

pariwisata secara administrasi dalam perumusan kebijakan nasional, strategi, aksi, dan proses yang merupakan suatu hal fundamental. Para pembuat kebijakan pariwisata juga harus memperkuat dialog mereka dengan kementerian yang lainnya guna memanfaatkan keterkaitan pariwisata dan dampaknya terhadap sektor serta industri lain (United Nations World Tourism Organization & United Nations Development Programme, 2017). Demikian pula, dalam mengatasi tantangan dan ancaman pariwisata seperti yang telah dikemukakan di atas maka akan membutuhkan kebijakan terpadu yang sepenuhnya mempertimbangkan dampak lintas sektor pariwisata terhadap SDGs.

Sebagai bagian dari fenomena sosial, perkembangan kepariwisataan di dunia saat ini sangat berfokus kepada aspek kelestarian cagar budaya (*cultural heritage*) dan pelestarian lingkungan alam (*conservation of the natural environment*). Banyak destinasi wisata yang perlahan sudah mulai meminimalisir dampak sosial budaya dan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh fenomena pariwisata. Perkembangan pariwisata saat ini cenderung tidak lagi mengadaptasi pengembangan pariwisata massal (*massed tourism development*) akan tetapi lebih berfokus kepada pengembangan pariwisata secara khusus (Amerta, Sara, & Bagiada, 2018). Adapun tahapan pengembangan pariwisata pada saat ini lebih mengarah sebagai stimulus kepedulian terhadap daya dukung dari pariwisata yang berfokus kepada lingkungan alam dan budaya serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Berasal dari motivasi, kesadaran, dan kepekaan para wisatawan asing, suatu destinasi wisata perlu untuk mempertimbangkan daya tampung pada lingkungan alam

dan budaya dalam rangka mengakomodasi ekspektasi para wisatawan yang kerap kali terbatas pada produk fisik yang dapat ditawarkan, pengalaman dan pemahaman berwisata yang luar biasa (*the real experience*) dan layanan inovatif yang berkualitas. Menurut Amerta et al (Amerta et al., 2018) pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat tercapai apabila tingkat pemanfaatan berbagai sumber daya tidak melewati batas kemampuan bagi sumber daya tersebut untuk melakukan regenerasi. Berikut adalah prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Amerta et al, yakni:

1. Menjaga kualitas lingkungan,
2. Memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan wisatawan,
3. Menjaga hubungan antara pariwisata dan lingkungan,
4. Menjaga keharmonisan yang terjadi antar penduduk setempat dan lingkungan,
5. Menciptakan kondisi dinamis yang disesuaikan dengan daya dukung, dan
6. Semua pemangku kepentingan perlu untuk bekerjasama dalam suatu misi yang sama guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu aspek yang telah diketahui secara umum terkait pembangunan pariwisata berkelanjutan ialah usaha untuk memerangi kepadatan yang dapat ditemukan pada tujuan wisata tertentu serta adanya usaha untuk menghindari kerusakan yang dapat disebabkan oleh kepadatan. Terjadinya suatu kepadatan pada aktivitas pariwisata kerap kali dipengaruhi oleh keputusan yang diambil ketika hendak melakukan perjalanan ke suatu tujuan wisata tertentu yang biasanya

dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu lainnya seperti ekonomi, lingkungan, hingga berbagai faktor sosiologis (Santana-Jiménez & Hernández, 2011). Identifikasi dan bobot relatif dari faktor tersebut merupakan inti masalah dalam penelitian pariwisata karena faktor tersebut sangat penting untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan pada sektor pariwisata.

Kepadatan destinasi wisata dan kerusakan yang disebabkan baik di kota maupun terhadap lingkungan alam merupakan salah satu kritik paling tajam yang sering kali ditujukan kepada sektor pariwisata. Berdasarkan hal ini maka pembangunan pariwisata berkelanjutan didasarkan pada promosi dan pengembangan tujuan wisata yang belum terlalu padat. Dengan kata lain, pariwisata massal yang berkelanjutan merupakan hasil bagi sebagian besar tujuan pariwisata (Palacios-Florencio, Santos-Roldán, Berbel-Pineda, & Castillo-Canalejo, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, konsep pariwisata berkelanjutan merupakan suatu hal yang dapat dipertimbangkan kembali dalam penerapannya, sebab konsep ini berkaitan dengan masalah kenyamanan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep utama dari pembangunan pariwisata berkelanjutan yang menyebabkan dampak terhadap sektor ekonomi, lingkungan dan sosial serta dapat pula memberi pengaruh yang sangat besar terhadap status quo. Sebab, pembangunan pariwisata berkelanjutan memiliki kaitan yang erat dengan ketiga dimensi keberlanjutan, yakni: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dikarenakan ekonomi global, perkembangan sosial dan teknologi masih dalam tahap perkembangan, analisis mengenai bentuk-bentuk yang secara spesifik pun diperlukan

dalam pariwisata guna mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan (Streimikiene et al., 2020). Oleh sebab itu, pembangunan pariwisata berkelanjutan erat kaitannya dengan daya saing melalui peningkatan inovasi di segala bidang yang relevan dengan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Di antara 17 tujuan dari SDGs, tujuan nomor 8 mengenai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi merupakan tujuan yang paling relevan dalam upaya untuk memaksimalkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dikarenakan pada tujuan ini terdapat penekanan mengenai pengembangan bisnis yang berkaitan dengan pariwisata pada tingkat lokal, regional, dan nasional. Di samping itu, tujuan SDGs nomor 12 dan 17 pun memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang menjadi fokus penelitian penulis.

Agenda 2030 PBB mengenai Pembangunan Berkelanjutan merupakan dasar dari upaya UNWTO guna membangun kerangka kerja bersama yang berpusat pada pariwisata berkelanjutan. SDGs merupakan kerangka kerja yang dinegosiasikan dan disepakati antara pemerintah, dimana dalam upaya pengimplementasiannya akan melibatkan industri besar dan kelompok *multi-stakeholder* yang mewakili berbagai sektor, termasuk pengaruh perusahaan-perusahaan secara signifikan (Bianchi & De Man, 2021). Kebutuhan pertumbuhan yang dinyatakan dengan jelas dalam tujuan SDGs nomor 8 dengan tekad, yakni: “menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, lapangan pekerjaan yang melimpah dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua pihak.” (United Nations:

Department of Economic and Social Affairs, 2015c). Pada poin ini, pertumbuhan ditegaskan kembali sebagai tujuan eksplisit dari pembangunan berkelanjutan.

Pariwisata secara eksplisit dibahas dalam Target 8.9: “Pada tahun 2030, merancang dan menerapkan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan pekerjaan dan mempromosikan produk lokal.” (De Man, 2019). Secara lebih spesifik, pada tujuan SDGs nomor 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi terdapat kurang lebih 17 indikator yang menjadi titik acuan bagi negara dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah uraian 17 indikator dari tujuan SDGs nomor 8 yang disajikan secara rinci dalam bentuk tabel :

Tabel 2. 1 Indikator SDGs nomor 8
 Sumber: Official Website of the United States Government, 2016.

8.1.1	Tingkat pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.
8.2.1	Tingkat pertumbuhan tahunan PDB per orang yang bekerja.
8.3.1	Proporsi pekerjaan informal dalam pekerjaan non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
8.4.1	Jejak material, jejak material per kapita, dan jejak material per PDB.
8.4.2	Konsumsi bahan domestik, konsumsi bahan domestik per kapita, dan konsumsi bahan domestik per PDB.
8.5.1	Penghasilan rata-rata per jam dari karyawan perempuan dan laki-laki, berdasarkan pekerjaan, usia, dan penyandang disabilitas.
8.5.2	Tingkat pengangguran, berdasarkan jenis kelamin, usia dan penyandang disabilitas.
8.6.1	Proporsi pemuda (berusia 15-24 tahun) tidak mengenyam pendidikan, pekerjaan dan pelatihan.
8.7.1	Proporsi dan jumlah anak usia 5-17 tahun yang terlibat sebagai pekerja anak, berdasarkan jenis kelamin dan usia.
8.8.1	Tingkat frekuensi cedera kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin dan status migran.

8.8.2	Tingkat kepatuhan nasional terhadap hak-hak buruh (kebebasan berserikat dan perundingan bersama) berdasarkan sumber tekstual International Labour Organization (ILO) dan undang-undang nasional, berdasarkan jenis kelamin dan status migran.
8.9.1	PDB langsung pariwisata sebagai proporsi dari total PDB dan tingkat pertumbuhan.
8.9.2	Proporsi pekerjaan di industri pariwisata berkelanjutan dari total pekerjaan pariwisata.
8.a.1	Bantuan untuk komitmen dan pengeluaran perdagangan.
8.b.1	Keberadaan strategi nasional yang dikembangkan dan dioperasionalkan untuk ketenagakerjaan muda, sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.
8.10.1	(a) Jumlah cabang bank komersial per 100.000 orang dewasa, dan (b) jumlah Automated Teller Machine (ATM) per 100.000 orang dewasa.
8.10.2	Proporsi orang dewasa (15 tahun ke atas) yang memiliki rekening di bank atau lembaga keuangan lain atau dengan penyedia layanan uang seluler.

Berdasarkan pada tabel di atas, tujuan SDGs nomor 8 memiliki indikator khusus sebanyak 17 indikator. Ke-17 indikator tersebut mencakup berbagai tujuan dan strategi guna mengoptimalkan tujuan SDGs yang berhubungan dengan tujuan untuk mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi secara global. Namun, di antara 17 indikator yang telah diuraikan di atas, indikator yang secara langsung membahas mengenai pembangunan pariwisata berkelanjutan ialah terdapat pada dua indikator, yakni: indikator 8.9.1 mengenai Produk Domestik Bruto (PDB) pariwisata sebagai proporsi dari PDB total dalam tingkat pertumbuhan, dan indikator 8.9.2 mengenai proporsi pekerjaan di industri pariwisata berkelanjutan dari total pekerjaan pariwisata. Kedua indikator tersebut yang akan dijadikan sebagai landasan utama penulis dalam mengaitkan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang

berfokus pada tujuan SDGs nomor 8 dalam menganalisa kaitannya dengan salah satu fenomena pariwisata yaitu *overcrowding tourism*.

Meskipun definisi dari ‘pekerjaan yang layak’ (*decent work*) masih belum jelas dan berbeda-beda, sebagian besar definisi secara luas mencakup aspek mengenai martabat dan saling menghormati, kondisi dalam bekerja, hak dan perlindungan kerja, hak yang sehubungan dengan representasi kolektif, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang (*personal growth*) serta upah minimum atau upah yang layak (Baum, 2018). Mengutip pendapat Baum, pekerjaan yang layak dan pekerja selalu menjadi bahasan utama ketika berdebat mengenai pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pedoman ini yang kemudian menyimpulkan bahwa adanya target khusus sektor pariwisata berupa penekanan pada lingkungan kerja yang tidak diskriminatif, upah yang adil serta keseimbangan pada pengalaman bekerja yang layak dan keterlibatan pekerja. Relevansi untuk pekerjaan yang layak dalam sektor pariwisata terletak pada intensitas tenaga kerja industri serta peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi bagi perempuan, para migran maupun anak muda (Winchenbach, Hanna, & Miller, 2019). Hal ini pula yang dapat mengembangkan kondisi kerja yang lebih layak bagi suatu negara ke depannya.

Selanjutnya mengenai keadaan pada status quo dimana terjadi pertumbuhan yang melampaui batas ekologis, kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi dan meningkatnya ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Beberapa masalah yang telah disebutkan di atas memiliki kaitan yang erat dengan konsumsi masyarakat serta produksi barang dan jasa.

Krisis ekologi berupa penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, polusi, maupun berbagai gangguan yang terjadi secara alami merupakan refleksi langsung dari apa yang nantinya akan diproduksi dan dikonsumsi, termasuk dalam hal kuantitas (jumlah). Adanya krisis pada kemanusiaan dan krisis sosial sebagian besar disebabkan oleh ketidakmerataan akses terhadap energi dan material serta ketidaksetaraan peluang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan setiap orang (Bengtsson, Alfredsson, Cohen, Lorek, & Schroeder, 2018). Agar dapat mengatasi ancaman tersebut maka dibutuhkan restrukturisasi dalam hal produksi dan konsumsi.

Di sisi lain, terdapat peran pariwisata pada industri pariwisata maupun wisatawan sebagai konsumen dalam upaya guna membentuk atau merespon persaingan kekuatan global. Peran ini mencakup pada sisi negatif berupa adanya kontribusi pariwisata terhadap emisi karbon global yang menyebabkan dampak negatif kepada masyarakat dan warisan budaya maupun alam. Namun, pariwisata turut membawa sisi positif berupa meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan hubungan antar budaya secara lebih erat (Font & McCabe, 2017). Sejumlah alasan tersebut yang kemudian dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dari realisasi tujuan SDGs nomor 12. Berikut adalah uraian indikator dari tujuan SDGs nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab yang diuraikan secara rinci melalui tabel, yakni:

Tabel 2. 2 Indikator SDGs nomor 12
 Sumber: United Nations: Department of Economic and Social Affairs, 2015d.

12.1.1	Jumlah negara berkembang, mengadopsi atau menerapkan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mendukung peralihan ke konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
12.2.1	Jejak material, jejak material per kapita, dan jejak material per PDB.
12.2.2	Konsumsi bahan domestik, konsumsi bahan domestik per kapita, dan konsumsi bahan domestik per PDB.
12.3.1	(a) Indeks kekurangan makanan dan (b) indeks sisa makanan.
12.4.1	Jumlah pihak dalam perjanjian lingkungan multilateral internasional tentang limbah berbahaya dan bahan kimia lainnya yang memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam mentransmisikan informasi sebagaimana disyaratkan oleh setiap perjanjian yang relevan.
12.4.2	(a) Limbah berbahaya yang dihasilkan per kapita; dan (b) proporsi limbah berbahaya yang diolah menurut jenis pengolahannya.
12.5.1	Tingkat daur ulang nasional, material yang didaur ulang dalam jumlah berton-ton.
12.6.1	Jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan (<i>sustainability reports</i>).
12.7.1	Tingkat kebijakan pengadaan publik yang berkelanjutan dan implementasi rencana aksi.
12.8.1	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan diutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional; (b) kurikulum; (c) pendidikan guru; dan (d) penilaian siswa.
12.a.1	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang di negara berkembang (dalam watt per kapita).
12.b.1	Implementasi perangkat akuntansi standar untuk memantau aspek ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan pariwisata.
12.c.1	Jumlah subsidi bahan bakar fosil (produksi dan konsumsi) per unit PDB.

Apabila merujuk kepada tabel yang tertera di atas maka terdapat 13 indikator pada tujuan SDGs nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab. Walaupun dari 13 indikator tidak ditemukan indikator yang secara khusus membahas mengenai pembangunan pariwisata berkelanjutan, akan tetapi jika 13 indikator tersebut diimplementasikan dengan maksimal, maka akan turut memberikan dampak kepada sektor pariwisata secara langsung. Hal ini dikarenakan tujuan dari setiap indikator akan mencakup berbagai aktivitas-aktivitas manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tak terkecuali dengan aktivitas pada sektor pariwisata. Sehingga dalam penerapannya, ke-13 indikator yang terdapat pada tujuan SDGs nomor 12 akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan dan menjadi salah satu faktor penentu guna menentukan berhasil atau tidaknya upaya implementasi SDGs.

Pada realitanya, pariwisata kerap kali dipahami sebagai “keinginan” daripada “kebutuhan,” suatu aktivitas konsumtif yang tidak esensial, dan hedonisme. Sehingga pariwisata erat kaitannya dengan praktik pemasaran (*marketing*). Oleh sebab itu, muncul gagasan bahwa pemasaran turut bertanggung jawab dalam mendorong kemunculan tingkat dan jenis konsumsi yang tidak bertanggung jawab (*irresponsible level and types of consumption*). Misalnya, pemasaran yang efektif ialah sebagian besar bertanggung jawab atas jumlah, jenis, dan asal wisatawan yang berkunjung pada suatu destinasi wisata. Bisnis juga penting untuk memastikan suatu destinasi dikatakan layak dan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Font & McCabe, 2017). Pemasaran memiliki fungsi penting

dalam menentukan seberapa berhasil suatu destinasi dalam mencapai tujuannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang serta memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan tujuan SDGs nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab.

Terakhir, tujuan SDGs nomor 17 mengenai Kemitraan untuk Menggapai Tujuan (*partnership for the goals*). Agenda 2030 PBB mengacu kepada dua jenis kemitraan dalam mengimplementasikan tujuan SDGs. Pertama ialah Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the Global Partnership for Sustainable Development*) yang akan diprakarsai oleh pemerintah sebagai suatu instansi yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mengimplementasikan Agenda 2030. Kemitraan ini bertujuan untuk menyatukan pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, sistem PBB dan aktor lainnya guna memfasilitasi keterlibatan global dalam hal implementasi dan mobilisasi dari semua sumber daya yang tersedia.

Kedua ialah Kemitraan *Multi-stakeholder* (*multi-stakeholder partnerships*). Dalam rangka untuk melengkapi kemitraan global, tentu saja penting untuk memperkuat sarana implementasi berupa tujuan dari dilaksanakannya suatu kemitraan yaitu untuk memobilisasi berbagai pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya finansial guna mendukung pelaksanaan SDGs (Horan, 2019). Kemitraan yang dimaksud, baik dalam segi mitra yang berpartisipasi maupun fokus dari implementasi kemitraan dapat diterapkan pada tingkat global, regional, nasional, maupun subnasional.

Tujuan SDGs nomor 17 mengenai kemitraan untuk menggapai tujuan memiliki 19 target yang diharapkan dapat direalisasikan hingga pada tahun 2030. 19 target tersebut umumnya mencakup mengenai kemitraan secara global bagi negara anggota PBB agar memudahkan pengimplementasian dari Agenda 2030 PBB.

Berikut adalah uraian 19 target dari tujuan SDGs nomor 17, yakni:

Tabel 2. 3 Target SDGs nomor 17
 Sumber: United Nations: Department of Economic and Social Affairs, 2015e.

17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara-negara berkembang guna meningkatkan kapasitas domestik bagi pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya.
17.2	Negara-negara maju untuk melaksanakan komitmen resmi terkait bantuan pembangunan dari mereka secara sepenuhnya, termasuk dengan komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen Bantuan Pembangunan Resmi / Pendapatan Nasional Bruto bagi negara berkembang dan 0,15 hingga 0,20 persen Bantuan Pembangunan Resmi / Pendapatan Nasional Bruto bagi negara kurang berkembang; Adanya dorongan bagi penyedia Bantuan Pembangunan Resmi untuk mempertimbangkan mengenai penetapan target agar menyediakan setidaknya 0,20 persen Bantuan Pembangunan Resmi / Pendapatan Nasional Bruto ke negara-negara kurang berkembang.
17.3	Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai sumber.
17.4	Membantu negara-negara berkembang dalam mencapai keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan terkoordinasi yang bertujuan untuk mendorong pembiayaan utang, penghapusan utang dan restrukturisasi utang sebagaimana mestinya serta mengatasi utang luar negeri dari negara-negara miskin yang berutang tinggi guna mengurangi tekanan utang.
17.5	Mengadopsi dan menerapkan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan (<i>North – South</i>), Selatan-Selatan (<i>South – South</i>) dan daerah segitiga regional (<i>triangular regional</i>) serta akses ke ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi untuk peningkatan berbagi pengetahuan dengan syarat yang telah disepakati bersama, termasuk melalui peningkatan koordinasi di antara mekanisme yang ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan melalui mekanisme fasilitas teknologi global.
17.7	Mempromosikan pengembangan, transfer, diseminasi dan difusi teknologi ramah lingkungan ke negara-negara berkembang dengan syarat-syarat yang

	menguntungkan, termasuk syarat-syarat konsesional dan preferensial, sebagaimana disepakati bersama.
17.8	Mengoperasionalkan sepenuhnya bank teknologi dan mekanisme pengembangan kapasitas sains, teknologi dan inovasi untuk negara-negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
17.9	Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan terarah di negara-negara berkembang dalam mendukung rencana nasional untuk mengimplementasikan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama segitiga (<i>tringular cooperation</i>).
17.10	Mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang universal, berdasarkan aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (the World Trade Organization) termasuk melalui penyelesaian negosiasi di bawah Agenda Pembangunan Doha (Doha Development Agenda).
17.11	Meningkatkan ekspor negara-negara berkembang secara signifikan, khususnya dengan tujuan untuk menggandakan pangsa ekspor global negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.
17.12	Mewujudkan implementasi tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota secara berkelanjutan untuk semua negara kurang berkembang, konsisten dengan keputusan World Trade Organization, termasuk dengan memastikan bahwa aturan asal preferensi yang berlaku untuk impor dari negara kurang berkembang transparan dan sederhana, dan berkontribusi untuk memfasilitasi akses pasar.
17.13	Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan koherensi kebijakan.
17.14	Meningkatkan koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.
17.15	Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan masing-masing negara untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan Kemitraan <i>Multi-stakeholder</i> .
17.16	Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilengkapi dengan kemitraan <i>multi-stakeholder</i> yang memobilisasi dan berbagi mengenai pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian dari tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya negara berkembang.
17.17	Mendorong dan mempromosikan kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan strategi sumber daya kemitraan Data, pemantauan, dan akuntabilitas.
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas terhadap negara-negara berkembang, termasuk bagi negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil (<i>small island developing states</i>) dalam upaya untuk

	meningkatkan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu, dan andal secara signifikan yang dipilah berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks nasional.
17.19	Pada tahun 2030, membangun inisiatif yang ada untuk mengembangkan tolak ukur kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi produk domestik bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

Melalui 19 tujuan yang telah diuraikan pada tabel di atas dapat dibuktikan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan Agenda 2030 PBB mengenai pembangunan berkelanjutan tentu diperlukan kerjasama dan kemitraan dari setiap aktor dalam hubungan internasional agar para aktor dapat bekerjasama dan bersinergi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama dengan lebih mudah dan efektif. Tujuan SDG nomor 17, khususnya pada target 17.6 dan 17.7 membutuhkan peningkatan kemitraan global dan kemitraan publik, sektor publik – privat dan masyarakat sipil yang lebih efektif (Horan, 2019). Kemitraan global berfokus kepada solidaritas, aksi kooperatif dan pembangunan tata kelola yang berkelanjutan. SDGs kemudian akan tercapai melalui kemitraan (*partnership of partnerships*) atau sistem kemitraan global (*global system of partnerships*).

Adapun peran dari kemitraan internasional (*international partnerships*) dalam mengimplementasikan SDGs bervariasi sesuai dengan konteks, organisasi, maupun kebutuhan terhadap proyek tertentu. Akan tetapi, tujuan utamanya ialah untuk menciptakan sinergi antara organisasi internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah serta lembaga sektor swasta guna mencapai SDGs yang lebih cepat, efisien, dan merata. Sinergi ini yang nantinya dimaksudkan untuk menciptakan

win-win situations agar semua mitra dan individu dapat meraih keuntungan (Leal Filho et al., 2022). Kemitraan internasional juga berpotensi untuk mendorong agenda SDGs melalui berbagai aturan yang positif, menciptakan koneksi lintas sektoral di berbagai tingkat kebijakan, dan turut memberdayakan masyarakat kelompok marginal dan rentan.

Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan tujuan SDGs nomor 17 ialah ekonomi. Pertumbuhan dan stabilitas kondisi ekonomi seringkali lebih diutamakan daripada pencapaian SDGs pada tingkat kebijakan nasional yang dapat berdampak negatif terhadap keterlibatan perusahaan swasta dalam kolaborasi SDGs. Ketidakseimbangan tersebut bisa menjadi masalah khususnya bagi negara dengan penghasilan ekonomi rendah yang agenda kemitraannya sebagian besar dipengaruhi oleh negara maju (Leal Filho et al., 2022). Kompleksitas dalam kemitraan dapat menciptakan ketegangan ketika sikap mitra yang hanya berfokus kepada keuntungan dalam jangka pendek.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

JUDUL TULISAN	TUJUAN	TEORI	HASIL PENELITIAN
<i>Urban Tourism Development in Prague: From Tourist Mecca to Tourist Ghetto</i> oleh Veronika Dumbrovska (2017)	Menganalisis perubahan aktivitas pengunjung di kota Praha dan hubungannya dengan <i>urban tourism development</i> .	<i>Urban Tourism</i> Teori Transformasi Struktural Negara	Fenomena <i>overcrowding tourism</i> yang terjadi di Royal Way kota Praha dapat berpengaruh terhadap transformasi struktural yang terjadi pada negara secara sistematis.
<i>Overtourism vs. Sustainable Development of Tourism. Attempts to Handle Overtourism Following the Example of Venice</i> oleh Malgorzata Kryczka (2019)	Mengatasi fenomena <i>overtourism</i> dengan mengikuti strategi yang diterapkan oleh pemerintah Venesia dan menganalisis fenomena tersebut menggunakan teori <i>sustainable development of tourism</i> .	<i>Sustainable Development of Tourism</i>	Identifikasi karakteristik yang mendasari terjadinya <i>overtourism</i> serta hubungan fenomena <i>overtourism</i> dengan konsep pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata Venesia.
<i>Monitoring System of Sustainable Development in Cultural and Mountain Tourism Destinations</i> oleh Jurigova Zuzana dan Lencsesova Zuzana (2015)	Membuat indikator sistem pembangunan berkelanjutan secara khusus yang berfokus pada destinasi budaya dan pegunungan.	<i>Development of Tourism Sustainability</i> <i>Indicators for Sustainability Development</i>	Adanya indikator sistem pembangunan berkelanjutan yang khusus untuk destinasi budaya dan pegunungan akan memudahkan negara untuk memonitor penerapan pembangunan berkelanjutan di destinasi wisata tersebut.

<p><i>Conceptualising Overtourism: A Sustainability Approach</i> oleh Tanja Mihalic (2020)</p>	<p>Menambahkan model sosio-psikologis dan sosio-politik pada pembangunan berkelanjutan dan hubungannya dengan fenomena <i>overcrowding tourism</i>.</p>	<p><i>Tourism Ecology</i> <i>Responsible Tourism</i></p>	<p>Adanya hubungan yang erat antara ekologi turisme (<i>tourism ecology</i>) dengan tanggung jawab turisme (<i>responsible tourism</i>) dalam upaya untuk mengkonseptualisasikan fenomena <i>overtourism</i> dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.</p>
<p><i>Revived Originals: A Proposal to Deal with Cultural Overtourism</i> Oleh Bruno S. Frey dan Andre Briviba (2021)</p>	<p>Meminimalisir dampak negatif dari <i>overcrowding tourism</i> dengan menerapkan konsep <i>cultural tourism</i> yang berfokus pada pemberdayaan destinasi budaya.</p>	<p><i>Revived Originals: Cultural Tourism</i></p>	<p>Konsep <i>revived originals</i> yang dicetuskan oleh Frey et al, berfokus kepada hubungan yang ditemukan pada fenomena <i>overtourism</i> dengan <i>cultural overtourism</i>.</p>

Tinjauan penelitian terdahulu pada tabel tersebut merupakan rujukan yang digunakan penulis dalam mengemukakan hipotesis sementara yang kemudian dapat memengaruhi arah dan hasil dari penelitian ini. Penelitian terdahulu menjadi tolak ukur penulis dalam menganalisis karakteristik variabel dan metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, sehingga temuan serta solusi yang ditawarkan akan menghasilkan kebaruan dan terhindar dari plagiasi. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dipilih sebagai rujukan dalam penelitian ini, yakni:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Veronika Dumbrovská pada tahun 2017 dengan judul “*Urban Tourism Development in Prague: From Tourist Mecca to Tourist Ghetto*” meneliti tentang perubahan gaya hidup penduduk lokal dan dampak *overcrowding tourism* di berbagai sektor yang disebabkan oleh fenomena lonjakan angka wisatawan asing di pusat bersejarah kota Praha, khususnya pada daerah Royal Way. Melalui penelitian tersebut ditemukan bahwa privatisasi, restitusi, maupun manajemen pariwisata yang buruk dapat menimbulkan dampak negatif terhadap sektor pariwisata di Praha yang pada akhirnya menyebabkan pembentukan “perkampungan turis” (*tourist ghetto*) di Royal Way. Dalam penelitian ini Dumbrovská mengaitkan fenomena *overtourism* dengan konsep transformasi struktural dalam mengkaji dampak negatif fenomena *overtourism*. Melalui penelitian ini, Dumbrovská turut menyadari bahwa pengelolaan kawasan wisata secara sistematis dan terpadu seharusnya menjadi prasyarat yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan pengembangan pariwisata di Praha pada masa yang akan datang dan sekaligus menjadikan prasyarat ini dapat dipercaya menjadi salah satu faktor penentu dalam mengoptimalisasikan pembangunan berkelanjutan di suatu negara.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Malgorzata Kryczka pada tahun 2019 yang berjudul “*Overtourism vs. Sustainable Development of Tourism. Attempts to Handle Overtourism Following the Example of Venice*” berorientasi pada dampak *overcrowding tourism* terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan di Venesia, Italia. Melalui penelitian ini, Kryczka mengidentifikasi karakteristik yang mendasari

terjadinya *overcrowding tourism* serta hubungannya dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan pada sektor pariwisata Venesia. Kryczka turut menganalisis metode penanganan *overcrowding tourism* yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menangani kasus *overcrowding tourism* di Venesia. Dalam penelitian ini kemudian dikemukakan bahwa dampak *overcrowding tourism* sangat berpengaruh dalam optimalisasi pembangunan pariwisata berkelanjutan khususnya pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jurigova Zuzana dan Lencsesova Zuzana pada tahun 2015 dengan judul “*Monitoring System of Sustainable Development in Cultural and Mountain Tourism Destinations*” juga berfokus pada destinasi pariwisata yang rentan terhadap dampak negatif pariwisata. Suatu destinasi dipercaya memerlukan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun destinasi pariwisata dengan lingkungan yang mudah rapuh dan dianggap rentan ialah destinasi budaya dan destinasi pegunungan (*cultural and mountain tourism destinations*). Penelitian ini mengemukakan bahwa destinasi budaya dan destinasi pegunungan merupakan dua area yang perlu diukur tingkat keberlanjutannya, sebab dapat memberi manfaat pada pelestarian lingkungan, sosial, serta bermanfaat pada sektor ekonomi. Oleh karena itu, Zuzana et al merumuskan suatu indikator yang berguna sebagai sistem pemantauan khusus yang berfokus pada destinasi budaya dan pegunungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tanja Mihalic dengan judul “*Conceptualising Overtourism: A Sustainability Approach*” berfokus pada kekhawatiran sektor sosial-politik atas pertumbuhan pariwisata dan dampak negatifnya terhadap alam dan lingkungan sosial yang telah mendorong akademisi untuk berfokus kepada dampak dari pariwisata. Adanya keberlanjutan studi pembangunan berkelanjutan, kemudian menghubungkan “pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan” yang terdiri atas keberlanjutan pada sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Pendekatan terhadap ketiga pilar ini mendominasi pemikiran mengenai pembangunan berkelanjutan. Namun, pada kenyataannya, destinasi pariwisata terus mendorong pertumbuhan pada sektor ekonomi dalam suatu tatanan sistem sosial-politik yang kapitalistik. Oleh sebab itu, terbentuk suatu hubungan yang erat antara ekologi turisme (*tourism ecology*) dan tanggung jawab turisme (*responsible tourism*) guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tengah fenomena *overcrowding tourism*.

Terakhir, penelitian dengan judul “*Revived Originals: A Proposal to Deal with Cultural Overtourism*” oleh Bruno S. Frey dan Andre Bribiva di tahun 2021 mengangkat isu mengenai dampak negatif dari *overcrowding tourism* melalui konsep *cultural tourism* yang berfokus pada pemberdayaan destinasi budaya. Dipercaya bahwa dampak negatif dari *overcrowding tourism* yang membebani penduduk setempat ialah dampak berupa kepadatan penduduk, vandalisme, maupun pencemaran polusi. Oleh sebab itu, dalam upaya untuk mengatasi perkembangan dari dampak negatif ini, Frey et al mengusulkan ‘Revived Originals’ yang merupakan

suatu pendekatan konseptual baru yang dirancang untuk secara identik mereplikasi situs bersejarah yang banyak dikunjungi di berbagai lokasi wisata populer. Melalui dukungan teknologi digital yang canggih seperti teknologi hologram, ‘Revived Originals’ menawarkan pengalaman sejarah yang lebih intens daripada yang dapat ditemukan pada situs-situs ‘historis’. Pada penelitian ini, Frey et al memberikan konsep alternatif yang ditujukan untuk situs-situs bersejarah yang telah penuh sesak dikarenakan efek pariwisata yang berlebihan.

Usulan Frey et al guna mengatasi dampak negatif dari lonjakan pariwisata budaya (*cultural tourism*) terdiri atas tiga langkah yang saling mendukung: a). Situs budaya yang dianggap penting utamanya bangunan dan alun-alun, akan persis direplikasi di lokasi yang sesuai. Situs yang akan direproduksi ialah situs yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan. Replikasi dengan model ini sangat mungkin untuk direalisasikan; b). Teknologi yang paling canggih akan digunakan untuk menghubungkan situs sejarah dengan budaya lokal yang sesuai. Hal ini dapat dicapai dengan sepenuhnya apabila menggunakan hologram guna menunjukkan bagaimana penduduk lokal menjalani hidup mereka; c). Replika situs sejarah tersebut harus disertai dengan infrastruktur yang memadai yang terdiri dari hotel, restoran, dan pertokoan serta fasilitas transportasi yang dapat mengurangi perjalanan yang berlebihan dari satu tujuan ke tujuan yang lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Profil Negara Republik Ceko

Republik Ceko atau yang biasa disebut Czechia (dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Ceko) merupakan negara yang terletak di bagian Eropa Tengah (Central Europe). Ceko terdiri dari beberapa provinsi bersejarah seperti Bohemia dan Moravia serta provinsi lainnya yang terletak di ujung selatan yaitu Silesia. Ketiga provinsi tersebut secara kolektif disebut sebagai Tanah Ceko (Czech Lands). Pada tahun 2016, Ceko mengadopsi nama “Czechia” sebagai nama informal dari Republik Ceko (Osborne, 2022). Tidak jauh berbeda dari negara-negara di benua Eropa, Republik Ceko juga kaya akan sejarah. Tak hanya itu, Ceko dikenal sebagai negara yang terkurung oleh daratan (*landlocked country*). Julukan tersebut diberikan kepada Republik Ceko sebab kondisi geografis Ceko dikelilingi oleh banyak negara.

Pada awal abad ke-9, Republik Ceko didominasi oleh kekaisaran Moravia. Faktanya, Republik Ceko saat ini terletak di wilayah yang dulunya merupakan wilayah Bohemia dan Moravia. Ditandai dengan runtuhnya Morovians, negara kecil ini kemudian secara resmi dianeksasi dan menjadi bagian dari the Holy Roman Empire (Kekaisaran Romawi Suci). Pada saat Perang Dunia Pertama, setengah dari wilayah Republik Ceko menjadi pusat industri terbesar di kawasan Eropa (Edsel G., 2014). Hal tersebut dikarenakan pemerintah pada saat itu senantiasa memperluas wilayah negaranya seluas mungkin.